

Andreas Rudiyanto, S.S., M. Hum

# ETIKA PROFESI

# PARIWISATA

UNTUK PROGRAM STUDY SI PARIWISATA



# **ETIKA PROFESI**

## *Pariwisata*

untuk Program Studi S1 Pariwisata

Andreas Rudiyanto, S.S., M. Hum



# ETIKA PROFESI PARIWISATA

untuk Program Studi S1 Pariwisata

**Penulis:** Andreas Rudianto, S.S., M. Hum.

**Desain Cover :** C. Arnol

**Tata Letak :** C. Arnol

Diterbitkan oleh:

Sopia Timur

Cetakan I: 2026

142 hlm; 14 x 21 cm

ISBN:

Hak Cipta dilindungi undang-undang

*All rights reserved*



**Sopia Timur**

Karangmojo, Wedomartani,  
Ngemplak, Sleman,  
Yogyakarta

# Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, serta penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul “Etika Profesi Pariwisata” ini dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang etika profesi yang sangat relevan dengan dunia pariwisata yang terus berkembang secara dinamis.

Perkembangan industri pariwisata di era globalisasi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah wisatawan, jenis layanan, maupun kompleksitas interaksi yang terjadi di dalamnya. Pariwisata tidak lagi sekadar aktivitas rekreasi, tetapi telah menjadi sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta pembangunan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman etika yang baik menjadi sangat penting.

Etika profesi merupakan salah satu landasan utama dalam membentuk perilaku profesional yang bertanggung jawab. Seorang pelaku industri pariwisata tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga harus mampu menjaga sikap, perilaku, serta keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Etika menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar, adil, serta menghormati martabat manusia, budaya lokal, dan lingkungan. Tanpa adanya pemahaman etika yang kuat, kegiatan pariwisata berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik sosial, eksploitasi budaya, hingga kerusakan lingkungan.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai etika, baik secara konseptual maupun aplikatif. Pembahasan diawali dengan pengertian etika dari berbagai sudut pandang, termasuk hubungan etika dengan moral, etiket, hukum, dan agama. Selanjutnya, buku ini menguraikan sistematika etika yang meliputi etika umum dan etika khusus, serta berbagai cabang etika seperti etika individual, etika sosial, dan etika keluarga. Pada bagian berikutnya, pembahasan difokuskan pada etika profesi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, medis, hukum, politik, dan terutama pariwisata sebagai fokus utama buku ini.

Melalui penyajian materi yang terstruktur dan mendalam, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar etika serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen, praktisi, serta pelaku industri pariwisata dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang tidak hanya profesional tetapi juga beretika.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari berbagai sumber literatur, pemikiran para ahli, serta pengalaman dalam bidang pendidikan dan praktik profesional. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi kedalaman materi, penyajian, maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta,

2026

Penulis

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	3
<b>Daftar Isi</b> .....	5
<b>Bab I: PENGERTIAN ETIKA</b> .....	7
A. Penjelasan Istilah Etika.....	7
B. Sistematika Etika .....	21
C. Etika sebagai cabang Filsafat.....	53
<b>Bab II: TEORI ETIKA</b> .....	61
A. Teori Etika .....	61
B. Kegunaan Teori Etika .....	72
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Etis .....	74
<b>Bab III: ETIKA BISNIS DAN PROFESI: Implementasi Standar</b>	
<b>Etika dalam Berbagai Bidang Bisnis dan Profesi</b> .....	91
A. Sales-Marketing (Consumer Rights) .....	91
B. Finance (Corruption, Fraud) .....	94
C. IT (AI, Privacy, Creativity Infringements / Copy Rights Issues) .....	96
D. Government (Corruption, Costumer Service) .....	99
E. Medicine (Huma Rights) .....	102
F. Tourism (Global of Ethics for Tourism / GCET) .....	105
<b>Bab IV: KODE ETIK PARIWISATA GLOBAL</b> .....	109
A. Penerapan GCET dalam Industri Pariwisata (Contoh / Studi Kasus) .....	109

<b>Bab V: FAKTOR-FAKTOR KONTRIBUTOR TERHADAP</b>	
<b>TERJADINYA PELANGGARAN ETIKA</b> .....	113
A. Faktor Internal.....	113
B. Faktor External (General Business Environment / GBE): Faktor Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Teknologi, Environment / Lingkungan Alam, Legal (PESTEL).....	119
C. Mini Case Study: Identifikasi Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Terjadinya Pelanggaran Etika pada Kasus-Kasus yang Diberikan .....	122
<b>Bab VI: PENDEKATAN ANALISIS TERHADAP KASUS-KASUS</b>	
<b>PELANGGARAN ETIKA</b> .....	127
A. Kerangka Analisis.....	127
B. Penerapan Kerangka Analisis dalam Studi Kasus.....	138
<b>Daftar Pustaka</b> .....	141
<b>Catatan</b> .....	142

# Pengertian Etika

## BAB I

### A. PENJELASAN ISTILAH ETIKA

#### 1. Definisi Istilah Etika

Istilah etika merupakan konsep yang sangat penting dalam memahami perilaku manusia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Dalam kehidupan sehari-hari, kata etika sering digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, etika tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.



<https://medium.com/@yashprof2004/s02-the-power-of-moral-values-in-education-f2d29aaaf139>

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Kata ini memiliki beberapa makna, antara lain kebiasaan, adat, watak, karakter, sikap, dan cara berpikir seseorang. Dalam bentuk jamaknya, yaitu ta etha, kata tersebut berarti adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa etika pada dasarnya berkaitan dengan kebiasaan atau pola perilaku manusia yang dianggap baik dan pantas dalam kehidupan sosial. Istilah ini kemudian digunakan oleh filsuf Yunani,

khususnya Aristoteles, untuk merujuk pada kajian tentang moralitas manusia dalam bidang filsafat yang kemudian dikenal sebagai filsafat moral.<sup>1</sup>

Dengan demikian, secara etimologis etika dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kebiasaan atau tindakan manusia dalam kaitannya dengan nilai baik dan buruk. Namun, pengertian etika tidak berhenti pada asal-usul kata tersebut. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, etika berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang secara sistematis mempelajari prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki beberapa pengertian yang saling berkaitan. Pertama, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral manusia. Kedua, etika juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika merujuk pada nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat.<sup>2</sup> Ketiga pengertian tersebut menunjukkan bahwa etika tidak hanya dipahami sebagai ilmu, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak.

Berdasarkan pengertian tersebut, etika dapat dipahami dalam beberapa dimensi. Pertama, etika sebagai sistem nilai atau norma moral yang menjadi pedoman bagi individu maupun kelompok dalam menentukan tindakan yang benar atau salah. Dalam pengertian ini, etika berfungsi sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai etika membantu manusia untuk menilai tindakan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sesuai dengan norma yang berlaku atau justru melanggarnya.

Kedua, etika juga dapat dipahami sebagai kumpulan asas atau prinsip moral yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat atau profesi tertentu. Dalam konteks ini, etika sering diwujudkan dalam bentuk kode etik yang mengatur standar perilaku anggota

---

1 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 4.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

suatu profesi. Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

Ketiga, etika sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari secara sistematis tentang moralitas manusia. Dalam pengertian ini, etika tidak hanya menjelaskan perilaku manusia, tetapi juga melakukan refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar, seperti apa yang dimaksud dengan tindakan yang baik, mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam berbagai situasi kehidupan.<sup>3</sup> Dalam kajian filsafat moral, etika memiliki peranan penting karena membantu manusia memahami dasar-dasar rasional dari tindakan moral. Etika tidak sekadar memberikan aturan tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga memberikan alasan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dengan demikian, etika membantu manusia untuk bertindak secara lebih sadar, rasional, dan bertanggung jawab.

Selain itu, etika juga memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter individu dan kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai etika mengajarkan manusia untuk menghargai orang lain, bertanggung jawab atas tindakannya, serta mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Dengan adanya etika, kehidupan sosial dapat berlangsung secara lebih harmonis karena setiap individu memiliki pedoman moral dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks dunia profesional, pemahaman tentang etika menjadi semakin penting. Setiap profesi memiliki tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan kejujuran. Oleh karena itu, etika menjadi landasan bagi terbentuknya perilaku profesional yang bertanggung jawab. Seorang profesional tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dalam bidangnya, tetapi juga harus mampu menjaga standar moral dalam menjalankan pekerjaannya.

---

3 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan ilmu sekaligus sistem nilai yang membahas tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Etika memberikan pedoman bagi manusia dalam bertindak, membantu mereka mengambil keputusan yang tepat, serta menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial maupun dalam dunia profesional.

## 2. Etika Moral

Dalam kajian filsafat, istilah etika tidak dapat dilepaskan dari konsep moral. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari karena keduanya sama-sama berkaitan dengan penilaian mengenai baik dan buruknya perilaku manusia. Namun secara konseptual, etika dan moral memiliki perbedaan sekaligus hubungan yang sangat erat. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai moralitas, sedangkan moral mengacu pada nilai, norma, atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat.



<https://tebureng.online/menentukan-dua-pilihan-dalam-kehidupan/>

Secara umum, moral dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan tindakan yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta pantas atau tidak pantas dilakukan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai moral tersebut biasanya berkembang dari tradisi, kebudayaan, agama, maupun pengalaman hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, moral sering kali berfungsi sebagai pedoman praktis yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)*.

Dalam konteks ini, etika berperan untuk menelaah secara kritis nilai-nilai moral tersebut. Etika tidak sekadar menerima norma moral yang berlaku, tetapi juga mencoba memahami dasar rasional dari norma tersebut, mengkaji alasan mengapa suatu tindakan dianggap baik atau buruk, serta mempertanyakan apakah norma tersebut masih relevan dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang mempelajari moralitas atau tingkah laku manusia dari sudut pandang filosofis.<sup>5</sup>

Moralitas sendiri berkaitan erat dengan kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bersama, setiap individu tidak dapat bertindak secara bebas tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, norma moral muncul sebagai pedoman yang mengatur hubungan antarmanusia agar tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan tertib. Moral mengarahkan manusia untuk bertindak tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bersama serta kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Dalam perspektif etika profesi, moralitas memiliki peran yang sangat penting karena setiap profesi menuntut tanggung jawab moral tertentu. Seorang profesional tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis atau keahlian dalam bidangnya, tetapi juga harus memiliki integritas moral yang tinggi. Integritas tersebut tercermin dalam sikap jujur, tanggung jawab, keadilan, serta komitmen untuk melayani kepentingan masyarakat secara profesional. Tanpa landasan moral yang kuat, keahlian profesional justru dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.

Etika moral juga berkaitan dengan kemampuan individu untuk membuat keputusan etis dalam situasi yang kompleks. Dalam praktik kehidupan profesional, sering kali seseorang menghadapi dilema moral, yaitu situasi ketika dua nilai atau kewajiban moral saling bertentangan. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman tentang etika

---

5 Nurdien H. Kistanto, *Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, Modul Etika Profesi (Jakarta: Universitas Terbuka)*, 1.2.

6 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007)*, 1.12.

moral membantu individu untuk mempertimbangkan berbagai nilai, konsekuensi, dan prinsip moral sebelum mengambil keputusan yang dianggap paling benar dan bertanggung jawab.

Selain itu, moralitas tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial. Nilai-nilai moral berkembang dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta lembaga pendidikan yang membentuk karakter seseorang. Faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, kebudayaan, dan agama turut mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Dengan demikian, pembentukan moral bukan hanya tanggung jawab individu semata, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan pemikiran filsafat, berbagai teori etika muncul untuk menjelaskan dasar moralitas manusia. Beberapa teori tersebut antara lain teori deontologi yang menekankan kewajiban moral, teori teleologi yang menilai tindakan berdasarkan tujuan atau akibatnya, serta relativisme etis yang memandang bahwa norma moral dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya dan masyarakat tertentu. Teori-teori tersebut membantu manusia memahami berbagai perspektif dalam menilai tindakan moral dan memberikan landasan untuk memecahkan persoalan etika dalam kehidupan nyata.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika moral merupakan kajian yang membahas nilai, norma, dan prinsip yang menentukan baik atau buruknya tindakan manusia. Moral menyediakan pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan etika memberikan refleksi kritis dan rasional terhadap pedoman tersebut. Dalam konteks kehidupan profesional, pemahaman tentang etika moral menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi seseorang untuk bertindak secara bertanggung jawab, menjaga integritas profesi, serta memberikan pelayanan yang adil dan bermartabat kepada masyarakat.

---

7 Jayshree Suresh dan B. S. Raghavan, *Professional Ethics: Values and Ethics of Profession* (New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 2005), 47–49.

8 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 15–21.

### 3. Etika dan Etiket

Dalam pembahasan mengenai etika, sering kali muncul istilah lain yang dianggap memiliki makna serupa, yaitu etiket. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua istilah ini kerap digunakan secara bergantian, padahal secara konseptual etika dan etiket memiliki pengertian yang berbeda. Memahami perbedaan antara etika dan etiket sangat penting, terutama dalam konteks kehidupan sosial maupun profesional, karena keduanya berkaitan dengan tata perilaku manusia tetapi berada pada tingkat yang berbeda.



<https://glints.com/id/lowongan/etiket-jabat-tangan/>

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas secara kritis tentang moralitas atau tentang baik dan buruknya tindakan manusia. Etika berusaha menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi manusia dalam menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah, baik atau buruk. Oleh karena itu, etika tidak hanya berhubungan dengan tindakan lahiriah seseorang, tetapi juga berkaitan dengan niat, motivasi, serta tanggung jawab moral yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Etika membantu manusia memahami nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai dilema moral dalam kehidupan.<sup>9</sup>

Sebaliknya, etiket lebih berkaitan dengan tata cara atau aturan sopan santun yang berlaku dalam pergaulan sosial. Etiket berfungsi mengatur cara seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu agar sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan etiket biasanya mencakup hal-hal seperti cara berbicara, cara berpakaian, cara makan, cara menyapa orang lain, serta berbagai bentuk perilaku yang dianggap sopan dan pantas dalam interaksi

<sup>9</sup> Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Modul Etika Profesi (Jakarta: Universitas Terbuka)*, 1.2

sosial. Dengan demikian, etiket lebih menekankan pada aspek lahiriah atau formal dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Perbedaan mendasar antara etika dan etiket terletak pada kedalaman dan ruang lingkup pembahasannya. Etika berkaitan dengan prinsip moral yang bersifat fundamental dan universal, sedangkan etiket lebih berkaitan dengan kebiasaan sosial yang dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sebagai contoh, dalam suatu budaya tertentu, menyapa orang yang lebih tua dengan menundukkan kepala dianggap sebagai bentuk kesopanan, sedangkan dalam budaya lain cara menyapa tersebut mungkin berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa etiket sangat dipengaruhi oleh tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan setempat.

Selain itu, etika berhubungan dengan penilaian moral terhadap suatu tindakan, sedangkan etiket berkaitan dengan cara melakukan tindakan tersebut. Misalnya, membantu seseorang yang membutuhkan merupakan tindakan yang dinilai baik secara etis. Namun cara seseorang memberikan bantuan tersebut dapat diatur oleh etiket, misalnya dengan berbicara secara sopan, tidak merendahkan orang yang dibantu, serta menjaga perasaan orang lain. Dalam hal ini, etika menentukan bahwa membantu orang lain adalah tindakan yang baik, sedangkan etiket mengatur bagaimana bantuan tersebut diberikan secara sopan dan beradab.

Perbedaan lainnya terletak pada sifat kewajibannya. Etika bersifat lebih mendasar dan mengikat secara moral, sehingga pelanggaran terhadap etika dapat menimbulkan penilaian moral yang serius, seperti dianggap tidak jujur, tidak adil, atau tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etiket biasanya hanya dianggap sebagai ketidaksopanan atau kurangnya tata krama dalam pergaulan sosial. Meskipun demikian, etiket tetap memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat.

---

10 *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).*

Dalam kehidupan profesional, hubungan antara etika dan etiket menjadi sangat penting. Seorang profesional tidak hanya dituntut untuk bertindak secara etis dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap yang sopan dan menghargai orang lain dalam interaksi kerja. Sikap profesional tersebut tercermin melalui perilaku yang santun, komunikasi yang baik, serta kemampuan menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan rekan kerja, atasan, maupun masyarakat yang dilayani.

Dalam konteks etika profesi, etiket sering kali menjadi bagian dari budaya profesional yang mendukung penerapan nilai-nilai etika. Misalnya, dalam dunia pariwisata atau pelayanan publik, sikap ramah, sopan, dan menghormati tamu merupakan bentuk etiket yang sangat penting. Namun di balik sikap tersebut juga harus terdapat nilai etika yang lebih mendalam, seperti kejujuran dalam memberikan informasi, tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, serta komitmen untuk menghargai hak dan martabat setiap orang.

Dengan demikian, etika dan etiket memiliki hubungan yang saling melengkapi. Etika memberikan landasan moral yang menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah, sedangkan etiket memberikan pedoman mengenai bagaimana tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang sopan dan pantas dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan profesional, keduanya harus berjalan secara seimbang agar tercipta perilaku yang tidak hanya benar secara moral tetapi juga mencerminkan sikap profesional yang beradab dan menghargai sesama manusia.

#### 4. Etika dan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku manusia tidak hanya diatur oleh norma moral, tetapi juga oleh berbagai sistem aturan yang lebih formal, salah satunya adalah hukum. Oleh karena itu, dalam kajian etika sering dibahas hubungan antara etika dan hukum, karena keduanya sama-sama berfungsi mengatur perilaku manusia agar

kehidupan sosial dapat berlangsung secara tertib, adil, dan harmonis. Meskipun demikian, etika dan hukum memiliki karakteristik, tujuan, serta ruang lingkup yang berbeda.

Secara umum, etika merupakan cabang filsafat yang membahas secara kritis mengenai moralitas, yaitu tentang baik dan buruknya tindakan manusia. Etika berusaha memahami nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi manusia dalam menentukan sikap dan perilakunya. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk bertindak secara benar berdasarkan kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi.<sup>11</sup>



[https://www.researchgate.net/figure/The-Relationship-Between-Law-and-Ethics\\_fig1\\_301562238](https://www.researchgate.net/figure/The-Relationship-Between-Law-and-Ethics_fig1_301562238)

Sementara itu, hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Hukum memiliki kekuatan memaksa karena pelanggaran terhadap aturan hukum dapat dikenai sanksi yang tegas, baik berupa denda, hukuman administratif, maupun hukuman pidana. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat melalui mekanisme pengaturan yang formal dan institusional.

Hubungan antara etika dan hukum dapat dilihat dari tujuan yang sama, yaitu mengarahkan perilaku manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan tertib. Baik etika maupun hukum sama-sama berupaya mendorong manusia untuk bertindak secara benar dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Dalam banyak kasus, norma hukum sering kali berakar dari nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Nilai moral tersebut kemudian

11 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Modul Etika Profesi (Jakarta: Universitas Terbuka)*, 1.2

diformalkan menjadi aturan hukum agar dapat ditegakkan secara lebih efektif.

Sebagai contoh, larangan mencuri atau menipu pada awalnya merupakan norma moral yang menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak baik karena merugikan orang lain. Seiring dengan perkembangan masyarakat, norma tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk hukum pidana yang memberikan sanksi bagi pelaku pencurian atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sering kali lahir dari nilai-nilai etis yang telah diterima oleh masyarakat sebagai standar perilaku yang benar.

Meskipun demikian, etika dan hukum tetap memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Salah satu perbedaan utama terletak pada sumber dan sifat kewajibannya. Etika bersumber dari kesadaran moral individu serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pelaksanaannya lebih bergantung pada kesadaran pribadi. Seseorang bertindak secara etis bukan karena takut terhadap hukuman, tetapi karena ia menyadari bahwa tindakan tersebut benar dan sesuai dengan nilai moral yang diyakininya.

Sebaliknya, hukum bersumber dari otoritas resmi negara dan bersifat memaksa. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada kesadaran moral, tetapi juga pada adanya sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Oleh karena itu, seseorang mungkin saja mematuhi hukum bukan karena kesadaran moral, melainkan karena takut terhadap hukuman yang diberikan oleh sistem hukum.

Perbedaan lainnya terletak pada ruang lingkup pengaturannya. Etika memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan hukum karena tidak semua tindakan yang tidak etis diatur oleh hukum. Banyak tindakan yang dianggap tidak bermoral tetapi tidak dapat dikenai sanksi hukum. Misalnya, seseorang yang bersikap tidak sopan, tidak menghargai orang lain, atau tidak menepati janji mungkin dinilai tidak etis secara moral, tetapi tindakan tersebut belum tentu melanggar hukum. Sebaliknya, hukum hanya mengatur tindakan-tindakan tertentu yang dianggap penting untuk menjaga ketertiban masyarakat.

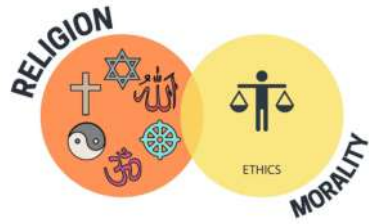
Selain itu, etika juga memiliki peran sebagai dasar dalam menilai dan mengkritisi hukum. Dalam beberapa situasi, suatu aturan hukum dapat dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, etika memberikan landasan bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Dengan kata lain, etika berfungsi sebagai standar moral yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu hukum telah mencerminkan keadilan dan kebaikan bersama. Dalam konteks profesi, hubungan antara etika dan hukum menjadi sangat penting karena setiap profesi biasanya memiliki dua bentuk pengaturan sekaligus, yaitu aturan hukum dan kode etik profesi. Aturan hukum mengatur aspek legal dari pekerjaan profesional, sedangkan kode etik mengatur standar moral dan tanggung jawab profesional yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Kedua sistem aturan tersebut saling melengkapi dalam menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam dunia profesi pelayanan publik atau pariwisata, seorang profesional tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tanpa adanya landasan etika yang kuat, kepatuhan terhadap hukum saja tidak cukup untuk menjamin terciptanya pelayanan yang berkualitas dan bermartabat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika dan hukum merupakan dua sistem norma yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam sumber, sifat, serta cara penegakannya. Etika lebih menekankan pada kesadaran moral individu, sedangkan hukum menekankan pada aturan formal yang disertai dengan sanksi. Dalam kehidupan profesional, pemahaman yang baik mengenai hubungan antara etika dan hukum sangat penting agar seseorang tidak hanya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga mampu mempertahankan integritas moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## 5. Etika dan Agama

Dalam kehidupan manusia, etika sering kali berkaitan erat dengan agama. Keduanya sama-sama membahas mengenai nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Baik etika maupun agama memberikan pedoman mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak agar kehidupannya selaras dengan nilai kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam kajian etika profesi penting untuk memahami hubungan antara etika dan agama agar seseorang mampu menempatkan keduanya secara tepat dalam kehidupan moral dan profesional.



[https://www.researchgate.net/figure/The-Relationship-Between-Law-and-Ethics\\_fig1\\_301562238](https://www.researchgate.net/figure/The-Relationship-Between-Law-and-Ethics_fig1_301562238)

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari secara rasional mengenai moralitas atau tentang baik dan buruknya tindakan manusia. Etika tidak hanya menerima begitu saja norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga berusaha memahami dan menjelaskan alasan rasional di balik norma tersebut. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral yang berkembang dalam kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Sementara itu, agama merupakan sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta memberikan pedoman moral bagi kehidupan manusia. Dalam setiap agama terdapat ajaran mengenai nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi umat beragama dalam menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara etika dan agama dapat dilihat dari kesamaan tujuan yang dimiliki keduanya, yaitu membimbing manusia agar

<sup>12</sup> Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Modul Etika Profesi* (Jakarta: Universitas Terbuka), 1.2.

hidup secara bermoral dan bertanggung jawab. Sebagian besar ajaran agama mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama sering kali menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan norma etika dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki kontribusi penting dalam pembentukan nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan sosial. Namun demikian, etika dan agama tetap memiliki perbedaan dalam pendekatan dan dasar pemikirannya. Etika berusaha menjelaskan moralitas melalui pendekatan rasional dan filosofis, sedangkan agama mendasarkan ajaran moralnya pada wahyu atau ajaran ilahi yang diyakini berasal dari Tuhan. Dalam etika, seseorang dapat menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk melalui pertimbangan rasional dan refleksi moral. Sebaliknya, dalam agama, penilaian moral sering kali dikaitkan dengan ketaatan terhadap ajaran Tuhan yang tercantum dalam kitab suci atau tradisi keagamaan.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa etika dan agama saling bertentangan. Dalam banyak kasus, nilai-nilai etika justru sejalan dengan ajaran agama. Misalnya, nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, serta penghormatan terhadap kehidupan manusia merupakan nilai yang diajarkan baik dalam etika maupun dalam berbagai ajaran agama. Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi dalam membentuk perilaku moral manusia.

Dalam masyarakat modern, terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan antara etika dan agama. Sebagian orang berpendapat bahwa etika sangat bergantung pada agama karena agama dianggap sebagai sumber utama nilai moral. Namun ada pula pandangan yang menyatakan bahwa etika dapat berdiri secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada agama, karena manusia memiliki kemampuan rasional untuk memahami nilai-nilai moral. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa etika dan agama memiliki hubungan yang erat dalam membentuk moralitas manusia.<sup>13</sup>

---

13 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 23–25.

Dalam konteks kehidupan profesional, hubungan antara etika dan agama juga memiliki peranan penting. Seorang profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga harus memiliki integritas moral yang kuat. Nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama, seperti kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain, dapat menjadi landasan penting dalam menjalankan profesi secara etis.

Selain itu, ajaran agama juga mendorong manusia untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam dunia profesional karena setiap profesi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hubungan antara etika dan agama dapat membantu seseorang untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional sekaligus bermoral.

Dengan demikian, etika dan agama merupakan dua sistem nilai yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing manusia untuk hidup secara baik dan bermoral. Etika memberikan dasar rasional untuk memahami nilai-nilai moral, sedangkan agama memberikan landasan spiritual dan keyakinan yang memperkuat komitmen manusia terhadap nilai-nilai tersebut. Dalam kehidupan profesional, keduanya dapat saling melengkapi dalam membentuk karakter dan integritas moral seseorang sehingga ia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

## **B. SISTEMATIKA ETIKA**

### **1. Etika Umum**

Dalam kajian filsafat moral, etika tidak hanya dipahami sebagai sekadar pembahasan mengenai baik dan buruknya tindakan manusia, tetapi juga sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki sistematika atau pembagian bidang kajian tertentu. Sistematika etika diperlukan agar pembahasan mengenai moralitas manusia dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mendalam. Salah satu pembagian yang

lazim digunakan dalam kajian etika adalah pembagian antara etika umum dan etika khusus. Etika umum menjadi dasar bagi seluruh pembahasan etika karena berfokus pada prinsip-prinsip moral yang bersifat umum dan berlaku bagi manusia secara universal. Etika umum pada dasarnya membahas prinsip-prinsip dasar moralitas manusia. Bidang ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang dimaksud dengan tindakan yang baik atau buruk, bagaimana manusia dapat menentukan keputusan moral, serta apa dasar yang digunakan untuk menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah. Dengan kata lain, etika umum berusaha memberikan kerangka teoritis yang menjadi landasan bagi seluruh pembahasan etika dalam berbagai bidang kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Dalam etika umum, perhatian utama diberikan pada refleksi filosofis mengenai nilai-nilai moral yang mendasari tindakan manusia. Etika tidak hanya menggambarkan perilaku manusia sebagaimana adanya, tetapi juga berusaha menilai dan menentukan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Oleh karena itu, etika umum sering dikaitkan dengan filsafat moral karena keduanya sama-sama berusaha memahami dasar-dasar rasional dari norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika dalam pengertian ini tidak hanya berkaitan dengan aturan perilaku, tetapi juga dengan proses refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral yang membimbing kehidupan manusia.<sup>15</sup> Salah satu aspek penting dalam etika umum adalah pembahasan mengenai moralitas manusia. Moralitas berkaitan dengan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan tindakan yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam berbagai situasi kehidupan. Etika umum berusaha menjelaskan asal-usul, makna, serta fungsi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan manusia.

---

14 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007),

15 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Modul Etika Profesi* (Jakarta: Universitas Terbuka), 1.2.

Selain itu, etika umum juga membahas berbagai pendekatan ilmiah dalam mempelajari moralitas manusia. Dalam kajian etika modern, terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan, antara lain etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Etika deskriptif berusaha menggambarkan perilaku moral manusia sebagaimana adanya dalam berbagai budaya dan masyarakat. Pendekatan ini mempelajari adat kebiasaan, norma, serta pandangan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Dengan demikian, etika deskriptif lebih bersifat empiris karena berusaha memahami fakta-fakta moral yang terdapat dalam kehidupan sosial.<sup>16</sup> Sementara itu, etika normatif berusaha menentukan standar atau norma yang seharusnya digunakan dalam menilai tindakan manusia. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan perilaku moral yang ada, tetapi juga memberikan pedoman mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Etika normatif sering membahas berbagai teori moral yang dikembangkan oleh para filsuf, seperti teori deontologi yang menekankan kewajiban moral, serta teori teleologi yang menilai tindakan berdasarkan tujuan atau akibatnya.

Selain kedua pendekatan tersebut, terdapat pula metaetika yang membahas makna dan dasar filosofis dari konsep-konsep moral itu sendiri. Metaetika berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa arti kata “baik”, “benar”, atau “kewajiban moral”. Dengan demikian, metaetika tidak secara langsung memberikan pedoman tindakan, tetapi lebih berfokus pada analisis filosofis terhadap bahasa dan konsep moral yang digunakan dalam etika.

Melalui berbagai pendekatan tersebut, etika umum memberikan dasar pemahaman yang sangat penting bagi perkembangan bidang etika lainnya. Tanpa adanya landasan teoritis dari etika umum, pembahasan mengenai etika dalam bidang-bidang khusus seperti etika profesi, etika bisnis, atau etika lingkungan tidak akan memiliki dasar filosofis yang kuat. Oleh karena itu, etika umum sering dianggap sebagai fondasi bagi seluruh kajian etika yang lebih spesifik.

---

16 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 15–21.

Dalam konteks etika profesi, pemahaman mengenai etika umum sangat penting karena prinsip-prinsip moral yang dibahas dalam etika umum menjadi dasar bagi pembentukan kode etik dalam berbagai profesi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan yang dibahas dalam etika umum kemudian diterapkan secara lebih spesifik dalam aturan etika yang mengatur perilaku para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, etika umum memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian etika secara keseluruhan. Etika umum tidak hanya memberikan pemahaman mengenai konsep dasar moralitas, tetapi juga menyediakan kerangka teoritis yang menjadi dasar bagi penerapan nilai-nilai etika dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam dunia profesi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang etika umum, seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk menilai tindakan secara moral serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

## 2. Etika Khusus

### a. Etika Individual

Dalam kajian filsafat moral, etika tidak hanya membahas prinsip-prinsip umum mengenai baik dan buruknya tindakan manusia, tetapi juga membahas penerapan prinsip tersebut dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, selain etika umum yang membicarakan dasar-dasar moralitas, terdapat pula etika khusus yang berfokus pada penerapan nilai-nilai moral dalam



<https://www.newportinstitute.com/resources/mental-health/how-to-stop-ruminating/>

bidang kehidupan tertentu. Etika khusus merupakan bagian dari etika yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip moral diterapkan dalam situasi konkret kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial.

Etika khusus pada dasarnya merupakan pengembangan dari etika umum. Jika etika umum membahas prinsip moral secara universal, maka etika khusus membahas penerapan prinsip tersebut dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, etika khusus berusaha memberikan pedoman praktis mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Etika khusus umumnya dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu etika individual dan etika sosial. Pembagian ini didasarkan pada hubungan manusia dengan dirinya sendiri serta hubungan manusia dengan orang lain dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Etika individual merupakan cabang dari etika khusus yang membahas kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks ini, etika individual menekankan pentingnya pembentukan karakter pribadi yang baik sebagai dasar bagi perilaku moral seseorang. Etika individual berkaitan dengan bagaimana seseorang mengembangkan sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan integritas moral dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia sebagai makhluk rasional memiliki kemampuan untuk menilai dan menentukan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan dirinya secara etis. Etika individual menekankan bahwa sebelum seseorang mampu menjalankan kewajiban moral terhadap orang lain, ia terlebih dahulu harus memiliki kesadaran moral terhadap dirinya sendiri. Kesadaran ini mencakup kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, serta komitmen untuk memilih tindakan yang benar berdasarkan pertimbangan moral.

---

17 Sulistyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007)

Dalam etika individual, perhatian utama diberikan pada pembentukan karakter dan kepribadian moral seseorang. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian moral, serta integritas menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter individu yang bermoral. Nilai-nilai tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses pembelajaran, pengalaman hidup, serta refleksi moral yang terus-menerus.

Selain itu, etika individual juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan bertindak secara bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang menuntut pertimbangan moral. Dalam situasi seperti ini, seseorang harus mampu menimbang konsekuensi dari tindakannya serta mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku. Etika individual membantu individu untuk mengembangkan kemampuan refleksi moral sehingga ia dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Pembentukan etika individual juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kesadaran moral dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, budaya, serta pengalaman sosial yang membentuk karakter seseorang. Lingkungan keluarga, misalnya, memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral sejak dini melalui proses pendidikan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Selain keluarga, lingkungan sosial dan budaya juga turut mempengaruhi perkembangan etika individual seseorang. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai moral yang dianggap penting dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasi oleh

---

18 Jayshree Suresh dan B. S. Raghavan, *Professional Ethics: Values and Ethics of Profession* (New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 2005), 47–49.

individu melalui proses sosialisasi, sehingga membentuk sikap dan perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, etika individual tidak hanya merupakan hasil dari refleksi pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks kehidupan profesional, etika individual memiliki peranan yang sangat penting. Seorang profesional tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis atau keahlian dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga harus memiliki integritas moral yang tinggi. Integritas tersebut tercermin dalam sikap jujur, bertanggung jawab, serta komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional. Tanpa adanya etika individual yang kuat, seseorang mungkin memiliki kemampuan profesional yang tinggi tetapi tidak mampu menjalankan profesinya secara bertanggung jawab.

Etika individual juga menjadi dasar bagi penerapan etika profesi. Setiap kode etik profesi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa para profesional menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral tertentu. Namun keberhasilan penerapan kode etik tersebut sangat bergantung pada kesadaran moral individu yang menjalankan profesi tersebut. Dengan kata lain, etika profesi hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh etika individual yang kuat dalam diri setiap anggota profesi.

Dengan demikian, etika individual merupakan bagian penting dari etika khusus yang membahas kewajiban moral manusia terhadap dirinya sendiri. Etika individual menekankan pentingnya pembentukan karakter moral yang baik sebagai dasar bagi perilaku manusia dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Melalui pengembangan etika individual yang kuat, seseorang dapat menjalani kehidupannya secara lebih bertanggung jawab, menjaga integritas moral, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

## b. Etika Sosial

### i) Sikap terhadap sesama

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu selalu terlibat dalam berbagai bentuk hubungan sosial yang



<https://lifestyle.kompas.com/image/2022/05/12/083402620/11-etiket-yang-bikin-kita-hidup-rukun-dengan-tetangga?page=1>

menuntut adanya aturan dan nilai-nilai moral tertentu. Oleh karena itu, dalam kajian etika dikenal suatu cabang yang disebut etika sosial, yaitu bagian dari etika khusus yang membahas kewajiban moral manusia dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan masyarakat secara luas. Etika sosial berusaha memberikan pedoman mengenai bagaimana manusia seharusnya bersikap dan bertindak dalam kehidupan bersama agar tercipta hubungan yang harmonis, adil, dan saling menghormati.

Etika sosial menekankan bahwa manusia tidak boleh hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain serta kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan seseorang selalu memiliki dampak terhadap orang lain. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya terhadap orang lain. Etika sosial mengajak manusia untuk tidak bertindak secara egois, melainkan mengembangkan sikap kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan yang dilakukan.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007)

Salah satu aspek penting dalam etika sosial adalah sikap terhadap sesama manusia. Sikap ini mencerminkan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks etika, sikap terhadap sesama tidak hanya berkaitan dengan perilaku lahiriah, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mendasari tindakan tersebut. Sikap terhadap sesama manusia harus didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu sebagai manusia.

Sikap menghormati sesama merupakan prinsip dasar dalam etika sosial. Setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan kebebasan. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang atau merendahkan martabatnya. Dalam kehidupan sosial, sikap saling menghormati tercermin melalui perilaku yang sopan, menghargai perbedaan, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang lain.

Selain sikap menghormati, etika sosial juga menekankan pentingnya sikap keadilan dalam hubungan antarmanusia. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya serta memperlakukan orang lain secara seimbang tanpa diskriminasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan hubungan sosial. Ketidakadilan dapat menimbulkan konflik serta merusak hubungan antara individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu harus berusaha bersikap adil dalam berbagai situasi kehidupan.

Sikap terhadap sesama juga mencakup sikap kepedulian dan solidaritas sosial. Kepedulian berarti memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Sikap ini mendorong seseorang untuk membantu sesama yang membutuhkan serta berpartisipasi dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Solidaritas sosial merupakan bentuk nyata dari kepedulian tersebut, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dan saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, sikap terhadap sesama manusia menjadi semakin penting. Perbedaan latar belakang budaya, agama, serta kepentingan sering kali menimbulkan potensi konflik dalam kehidupan sosial. Dalam situasi seperti ini, etika sosial memberikan pedoman bagi manusia untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. Sikap toleransi memungkinkan individu untuk hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda.

Etika sosial juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama. Tanggung jawab sosial berarti kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Tindakan seseorang tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan orang lain. Oleh karena itu, setiap individu harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil.<sup>20</sup>

Dalam konteks kehidupan profesional, sikap terhadap sesama manusia memiliki peranan yang sangat penting. Seorang profesional tidak hanya berinteraksi dengan rekan kerja, tetapi juga dengan masyarakat yang dilayani oleh profesinya. Oleh karena itu, sikap saling menghormati, kejujuran, keadilan, serta kepedulian terhadap orang lain menjadi nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap profesional. Tanpa adanya sikap tersebut, hubungan profesional dapat menjadi tidak sehat dan bahkan merugikan pihak lain.

---

20 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Modul Etika Profesi (Jakarta: Universitas Terbuka)*

Sebagai contoh, dalam dunia pelayanan publik atau pariwisata, sikap terhadap sesama manusia sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Seorang profesional yang memiliki sikap ramah, menghargai tamu, serta bersikap adil dalam memberikan pelayanan akan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat. Sebaliknya, sikap yang tidak menghargai orang lain dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

Dengan demikian, sikap terhadap sesama manusia merupakan salah satu unsur penting dalam etika sosial. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sikap saling menghormati, keadilan, kepedulian, serta tanggung jawab sosial, manusia dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks etika profesi, sikap tersebut juga menjadi dasar bagi terciptanya perilaku profesional yang bermartabat dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

## ii) Etika keluarga

Etika keluarga merupakan bagian dari etika sosial yang membahas mengenai norma, nilai, serta prinsip moral yang mengatur hubungan antaranggota keluarga. Dalam konteks etika sosial, keluarga dipandang sebagai unit sosial paling dasar yang membentuk



<https://www.akudankau.co.id/artikel/6-plus/peran-orang-tua-mendidik-anak>

karakter moral seseorang. Melalui keluarga, individu pertama kali belajar mengenai nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, penghormatan, dan kerja sama. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku etis seseorang di masyarakat.

Dalam kajian etika sosial, hubungan manusia tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat luas, tetapi juga dalam lembaga-lembaga sosial yang lebih kecil seperti keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat seseorang belajar mengenai kewajiban moral, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan membentuk pola perilaku yang kemudian terbawa dalam kehidupan sosial yang lebih luas, seperti di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dunia kerja. Dengan demikian, etika keluarga memiliki kontribusi besar dalam pembentukan moral individu dan stabilitas kehidupan sosial.<sup>21</sup>

Etika keluarga menekankan adanya tanggung jawab moral antaranggota keluarga. Orang tua memiliki kewajiban moral untuk memberikan pendidikan, bimbingan, dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga terhadap pembentukan karakter dan nilai moralnya. Melalui proses pendidikan dalam keluarga, anak belajar mengenai disiplin, tanggung jawab, empati, serta penghormatan terhadap orang lain. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar bagi perkembangan kepribadian dan perilaku etis anak di masa depan.

Sebaliknya, anak juga memiliki kewajiban moral terhadap orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dalam etika keluarga, hubungan antara orang tua dan anak bersifat timbal balik yang didasarkan pada rasa hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Anak diharapkan menghormati orang tua, mematuhi nasihat yang baik, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Hubungan yang dilandasi nilai moral ini akan menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan mendukung perkembangan moral seluruh anggota keluarga.

---

21 Sulistyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.11.

Nilai-nilai keluarga pada umumnya berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, dan hubungan timbal balik antaranggota keluarga. Keluarga biasanya terdiri dari orang tua dan anak yang terikat dalam hubungan emosional dan moral yang kuat. Nilai-nilai tersebut sering kali mencakup kepercayaan, kesetiaan, saling menghormati, serta kepedulian satu sama lain. Nilai keluarga juga dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lain seperti nilai agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi, karena keluarga tidak hidup secara terpisah dari masyarakat.<sup>22</sup>

Selain itu, etika keluarga juga berkaitan dengan peran keluarga sebagai agen sosialisasi moral. Melalui interaksi sehari-hari dalam keluarga, individu belajar mengenai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kebiasaan, pola komunikasi, serta cara penyelesaian konflik dalam keluarga akan memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif filsafat moral, keluarga juga dipandang sebagai tempat berkembangnya nilai-nilai kebajikan (*virtue*). Tokoh etika seperti Franz Magnis-Suseno menekankan bahwa kehidupan moral seseorang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat ia dibesarkan, terutama keluarga. Lingkungan keluarga yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas akan membantu individu mengembangkan karakter moral yang kuat.<sup>23</sup>

Dengan demikian, etika keluarga merupakan bagian penting dari etika sosial karena keluarga menjadi fondasi

---

22 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.34.

23 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 14.

utama pembentukan moral manusia. Melalui hubungan yang didasarkan pada nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan, keluarga berperan dalam membentuk individu yang mampu bertindak secara etis dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, pembinaan nilai-nilai moral dalam keluarga menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang bermoral dan harmonis.

### iii) Etika Profesi

- **Bisnis**

Etika bisnis merupakan salah satu bagian dari etika profesi yang termasuk dalam ruang lingkup etika sosial. Etika bisnis membahas prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam kegiatan ekonomi dan dunia usaha. Dalam konteks etika sosial, kegiatan bisnis tidak hanya dilihat sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga sebagai kegiatan yang harus memperhatikan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta kepentingan masyarakat luas.



<https://sisiplus.katadata.co.id/berita/ekonomi-bisnis/668/sebelas-etika-bisnis-bagi-pemula-agar-sukses-pada-2024>

Dalam sistematika etika, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan tertentu, termasuk bidang profesi dan kegiatan ekonomi. Etika khusus menuntun individu dalam mengambil keputusan moral dalam situasi konkret yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam profesinya. Dengan demikian, etika bisnis menjadi salah satu penerapan nyata dari prinsip-prinsip moral tersebut dalam dunia perdagangan, industri, maupun jasa.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007),

Etika bisnis menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus menjalankan aktivitasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam etika bisnis, karena hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen sangat bergantung pada kepercayaan. Tanpa adanya kejujuran, kegiatan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seperti penipuan, manipulasi informasi, atau praktik perdagangan yang tidak adil. Oleh karena itu, etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral agar aktivitas ekonomi tidak merugikan pihak lain dan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Selain kejujuran, etika bisnis juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik modal atau pemegang saham, tetapi juga terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, serta lingkungan. Dalam perspektif etika sosial, kegiatan bisnis harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi. Perusahaan yang menjalankan etika bisnis dengan baik biasanya akan memperhatikan kesejahteraan pekerja, kualitas produk, serta dampak lingkungan dari kegiatan produksinya.

Etika bisnis juga berkaitan erat dengan pengambilan keputusan moral dalam dunia usaha. Dalam praktik bisnis sering muncul dilema etis, misalnya antara memperoleh keuntungan yang besar dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori etika sangat penting untuk membantu pelaku bisnis mengambil keputusan yang tepat. Berbagai teori etika seperti deontologi, teleologi, maupun relativisme etis dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan dalam menilai apakah suatu tindakan bisnis dapat dianggap benar atau salah secara moral.<sup>25</sup>

Selain itu, etika bisnis juga berperan dalam menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Dalam masyarakat modern, kegiatan bisnis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan etika dalam bisnis menjadi sangat penting untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Perusahaan yang mengabaikan etika bisnis dapat menimbulkan berbagai masalah seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, monopoli, maupun praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Menurut para ahli etika, bisnis yang dijalankan secara etis tidak hanya memberikan manfaat moral, tetapi juga keuntungan jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Kepercayaan masyarakat, reputasi perusahaan, serta loyalitas konsumen sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan menjalankan prinsip-prinsip etika dalam kegiatannya. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis tidak hanya penting dari sudut pandang moral, tetapi juga dari sudut pandang keberlanjutan dan keberhasilan organisasi.

Dengan demikian, etika bisnis merupakan bagian penting dari etika profesi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan usaha dijalankan secara bermoral, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Etika bisnis membantu mengarahkan pelaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan.<sup>26</sup>

---

25 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.36.

26 A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 23–25.

- **Medis**

Etika medis merupakan salah satu cabang dari etika profesi yang membahas prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku tenaga kesehatan, khususnya dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai bagian dari etika sosial, etika medis menekankan tanggung jawab moral profesi kesehatan terhadap individu, masyarakat, dan kemanusiaan secara umum. Dalam praktiknya, etika medis memberikan pedoman mengenai bagaimana tenaga medis harus bersikap, mengambil keputusan, serta menjalankan pelayanan kesehatan secara profesional dan bermoral.

Dalam sistematika etika, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang lebih spesifik, termasuk dalam bidang profesi. Etika profesi sendiri mengatur standar perilaku moral



[https://res.cloudinary.com/dk0z4ums3/image/upload/v1634261316/attached\\_image/kajian-etik-dan-medi-kolegal-dari-memberikan-opini-kedua-0-alomedika.jpg](https://res.cloudinary.com/dk0z4ums3/image/upload/v1634261316/attached_image/kajian-etik-dan-medi-kolegal-dari-memberikan-opini-kedua-0-alomedika.jpg)

yang harus dipatuhi oleh individu yang menjalankan suatu profesi tertentu. Oleh karena itu, etika medis merupakan penerapan prinsip-prinsip etika umum dalam bidang pelayanan kesehatan, yang berkaitan dengan tanggung jawab moral tenaga medis terhadap pasien, masyarakat, dan sesama tenaga kesehatan.<sup>27</sup>

Etika medis berkembang karena profesi kesehatan memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Tenaga medis sering kali

---

27 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.10–1.11.*

dihadapkan pada situasi yang menyangkut keselamatan, kesehatan, bahkan kehidupan pasien. Oleh karena itu, profesi medis membutuhkan pedoman moral yang jelas agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis atau ilmiah, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Salah satu prinsip utama dalam etika medis adalah prinsip menghormati martabat dan hak pasien. Dalam praktik pelayanan kesehatan, pasien harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak atas tubuh dan kesehatannya sendiri. Hal ini mencakup hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan medis (*informed consent*), serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan antara tenaga medis dan pasien harus dilandasi oleh rasa hormat, kepercayaan, dan tanggung jawab moral.

Selain itu, etika medis juga menekankan prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak merugikan (*non-maleficence*). Prinsip berbuat baik mengharuskan tenaga medis untuk selalu mengutamakan kepentingan pasien serta memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Sementara itu, prinsip tidak merugikan menuntut tenaga medis untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien. Kedua prinsip ini menjadi dasar moral dalam pengambilan keputusan medis, terutama ketika tenaga medis menghadapi dilema etis dalam praktiknya.

Etika medis juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau status lainnya. Dalam

konteks ini, tenaga medis dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan adil kepada semua pasien. Dengan demikian, etika medis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu tenaga medis, tetapi juga sebagai dasar bagi sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

Dalam praktiknya, etika medis biasanya dituangkan dalam bentuk kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh para tenaga kesehatan. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus standar perilaku profesional yang mengatur hubungan antara tenaga medis dengan pasien, sesama tenaga medis, serta masyarakat. Kode etik juga menjadi sarana untuk menjaga kehormatan profesi dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Dari perspektif etika sosial, etika medis memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan. Kepercayaan tersebut sangat penting karena hubungan antara tenaga medis dan pasien didasarkan pada keyakinan bahwa tenaga medis akan bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Tanpa adanya kepercayaan ini, hubungan profesional dalam bidang kesehatan akan sulit terjalin dengan baik.

Dengan demikian, etika medis merupakan bagian penting dari etika profesi yang berfungsi untuk mengarahkan perilaku tenaga kesehatan agar tetap berpegang pada nilai-nilai moral dalam menjalankan tugasnya. Etika medis memastikan bahwa praktik pelayanan kesehatan tidak hanya didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan teknis, tetapi juga pada prinsip-prinsip kemanusiaan, tanggung jawab moral, serta penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>28</sup>

---

28 Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 7th ed. (New York: Oxford University Press, 2013), 12–15.

- Hukum

Etika hukum merupakan salah satu cabang dari etika profesi yang membahas prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh para praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, dan aparat penegak hukum lainnya. Etika hukum menjadi pedoman dalam menjalankan profesi hukum agar tidak hanya berpegang pada aturan formal yang tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial.



<https://kumparan.com/aissmandaa/peran-etika-dalam-membentuk-integritas-advokat-di-indonesia-23mnZtWbEo9/2/gallery/4>

Dalam sistematika etika, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan tertentu, termasuk bidang profesi. Etika khusus memberikan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak secara moral dalam situasi konkret yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas profesionalnya. Dalam konteks ini, etika hukum menjadi pedoman moral bagi para praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelindung keadilan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, para praktisi hukum dituntut untuk memiliki integritas moral yang tinggi. Tanpa adanya integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika, penegakan hukum dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap

---

29 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.10–1.11.

sistem hukum serta melemahkan fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.

Salah satu prinsip utama dalam etika hukum adalah prinsip keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, para penegak hukum harus memperlakukan setiap orang secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun kedudukan politik. Prinsip ini menuntut agar hukum ditegakkan secara objektif dan tidak diskriminatif. Seorang hakim, misalnya, harus memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan, kepentingan pribadi, atau pengaruh pihak lain.

Selain prinsip keadilan, etika hukum juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan profesi hukum. Para praktisi hukum harus menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Mereka tidak boleh memanipulasi fakta, menyalahgunakan kewenangan, atau melakukan praktik korupsi yang dapat merugikan pihak lain. Integritas moral ini menjadi dasar bagi terciptanya sistem hukum yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.

Etika hukum juga berkaitan dengan tanggung jawab profesional terhadap klien dan masyarakat. Seorang advokat, misalnya, memiliki kewajiban untuk membela kepentingan kliennya secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, pembelaan tersebut tetap harus dilakukan dalam batas-batas etika dan tidak boleh melanggar hukum maupun merugikan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, tanggung jawab seorang praktisi hukum tidak hanya terbatas pada kliennya, tetapi juga terhadap sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, etika hukum biasanya dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi yang mengatur standar

perilaku bagi para praktisi hukum. Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku profesional para anggota profesi hukum. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu, baik berupa teguran, pembekuan izin praktik, maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif etika sosial, etika hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berlandaskan etika sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat.

Dengan demikian, etika hukum merupakan bagian penting dari etika profesi yang bertujuan untuk memastikan bahwa profesi hukum dijalankan secara bertanggung jawab, jujur, dan adil. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik hukum, para praktisi hukum diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan bermoral.<sup>30</sup>

- Pariwisata, dll.

Etika pariwisata merupakan salah satu cabang dari etika profesi yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai moral dalam kegiatan industri pariwisata. Dalam konteks etika sosial, pariwisata bukan sekadar aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga merupakan kegiatan yang

---

30 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 63.

melibatkan interaksi antara berbagai pihak, seperti wisatawan, masyarakat lokal, pelaku usaha, serta pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika agar tidak merugikan masyarakat, budaya lokal, maupun lingkungan.

Dalam sistematika etika, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang bersifat spesifik, termasuk dalam bidang profesi. Etika profesi memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang harus bertindak secara etis dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya. Dengan demikian, etika pariwisata dapat dipahami sebagai pedoman moral bagi para pelaku industri pariwisata dalam menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.<sup>31</sup>

Industri pariwisata memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, penerapan etika dalam bidang pariwisata sangat



<https://mantrabali.com/wisatawan-hormati-budaya-bali-di-pura/>

penting untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Para pelaku industri pariwisata, seperti pengelola hotel, pemandu wisata, agen perjalanan, maupun pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat setempat.

31 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.10–1.11.

Salah satu prinsip utama dalam etika pariwisata adalah penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat lokal. Wisatawan maupun pelaku industri pariwisata diharapkan untuk menghormati adat istiadat, norma sosial, serta nilai-nilai budaya yang berlaku di daerah tujuan wisata. Tanpa adanya penghormatan terhadap budaya lokal, kegiatan pariwisata dapat menimbulkan konflik sosial atau bahkan merusak identitas budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, etika pariwisata menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi dalam interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal.

Selain itu, etika pariwisata juga berkaitan dengan tanggungjawab terhadap lingkungan. Kegiatan pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, maupun eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, pelaku industri pariwisata dituntut untuk mengembangkan praktik pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Hal ini mencakup upaya pengelolaan limbah, pelestarian kawasan wisata alam, serta penggunaan sumber daya secara bijaksana.

Etika pariwisata juga menekankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal. Industri pariwisata seharusnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur daerah. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan atau investor, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip etika pariwisata sering dirumuskan dalam bentuk kode etik atau pedoman internasional yang mengatur perilaku para pelaku industri pariwisata. Kode etik tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dilaksanakan secara bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, budaya, serta lingkungan. Kode etik ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

Dari perspektif etika sosial, etika pariwisata memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal. Melalui penerapan nilai-nilai etika, kegiatan pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarbudaya, meningkatkan pemahaman antarbangsa, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, etika pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi para pelaku industri pariwisata, tetapi juga sebagai landasan bagi pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.<sup>32</sup>

Selain pariwisata, etika profesi juga berlaku dalam berbagai bidang lainnya seperti bisnis, hukum, medis, ilmu pengetahuan, serta berbagai profesi yang berkembang dalam masyarakat modern. Setiap profesi memiliki standar moral dan kode etik yang dirancang untuk menjaga integritas profesi tersebut serta memastikan bahwa para anggotanya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dengan adanya etika profesi, setiap bidang pekerjaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung

---

32 *Global Code of Ethics for Tourism, World Tourism Organization (Madrid: UNWTO, 1999).*

terciptanya kehidupan sosial yang lebih adil dan bermartabat.<sup>33</sup>

#### iv) Etika politik

Etika politik merupakan salah satu bagian dari etika sosial yang membahas nilai-nilai moral dan prinsip etis yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Politik sebagai aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan publik, serta pengelolaan kehidupan bersama dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan moral. Oleh karena itu, etika politik berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa praktik politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan semata, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistematika etika, etika sosial membahas hubungan manusia dengan sesamanya dalam berbagai bentuk kehidupan bersama, termasuk dalam lembaga sosial seperti keluarga, masyarakat, negara, dan berbagai institusi lainnya. Politik merupakan salah satu bidang kehidupan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, etika politik menjadi sangat penting untuk mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral.<sup>34</sup>



<https://partainasdem.id/2026/02/07/pemimpin-harus-memiliki-kepekaan-dan-semangat-melayani-masyarakat/>

33 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 29.

34 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.11.

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seorang pemimpin politik memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan adil. Tanggung jawab tersebut mencakup upaya untuk melindungi hak-hak warga negara, menciptakan kebijakan publik yang adil, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu prinsip penting dalam etika politik adalah prinsip keadilan. Dalam kehidupan politik, keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Dengan demikian, etika politik berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan proses pengambilan keputusan politik agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain prinsip keadilan, etika politik juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para pejabat publik harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Praktik-praktik seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika politik karena merugikan kepentingan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Etika politik juga berkaitan dengan tanggung jawab moral para warga negara dalam kehidupan politik. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses politik. Oleh karena itu, warga negara juga dituntut untuk menjalankan partisipasi politik secara bertanggung jawab, misalnya dengan menggunakan hak pilih secara bijaksana, menghormati

perbedaan pendapat, serta menjaga sikap toleransi dalam kehidupan politik.

Dalam perspektif filsafat moral, etika politik menekankan bahwa tujuan utama dari kegiatan politik adalah untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih adil. Politik seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta melindungi hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, praktik politik yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Dengan demikian, etika politik memiliki peran penting dalam membimbing perilaku para pemimpin dan warga negara agar menjalankan aktivitas politik secara bermoral dan bertanggung jawab. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika politik, diharapkan kehidupan politik dapat berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Etika politik juga membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, berintegritas, serta mampu mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>35</sup>

#### v) Etika lingkungan

Etika lingkungan merupakan salah satu cabang dari etika sosial yang membahas hubungan moral antara manusia dan lingkungan alam. Dalam perkembangan pemikiran etika modern, perhatian terhadap lingkungan semakin meningkat karena aktivitas manusia sering kali menimbulkan kerusakan alam yang berdampak luas terhadap kehidupan makhluk hidup dan keberlanjutan bumi. Oleh karena itu, etika lingkungan hadir sebagai

---

35 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 86.

upaya untuk memberikan pedoman moral bagi manusia dalam memperlakukan alam secara bertanggung jawab.

Dalam sistematika etika, etika sosial membahas kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bersama. Etika sosial tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya serta dengan lingkungan alam secara keseluruhan. Dengan demikian, etika lingkungan menjadi bagian penting dari etika sosial karena menekankan tanggung jawab manusia terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem.<sup>36</sup>

Etika lingkungan menegaskan bahwa manusia tidak boleh memandang alam hanya sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi atau kepentingan jangka pendek. Sebaliknya, manusia harus menyadari bahwa alam memiliki nilai yang harus dihormati dan dilindungi. Alam menyediakan berbagai sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti air, udara, tanah, dan berbagai sumber daya hayati. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Salah satu prinsip utama dalam etika lingkungan adalah prinsip tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan. Aktivitas pembangunan dan kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan yang permanen. Dengan kata lain, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kegiatan

---

36 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.11.

yang dilakukan tidak merusak sistem ekologi yang menjadi penopang kehidupan.

Etika lingkungan juga berkaitan dengan kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari ekosistem yang lebih luas. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kerusakan terhadap lingkungan alam tidak hanya berdampak pada makhluk hidup lain, tetapi juga pada manusia sendiri. Misalnya, pencemaran air dan udara dapat mengancam kesehatan manusia, sedangkan kerusakan hutan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Selain itu, etika lingkungan juga menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian alam. Masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga sosial. Dalam konteks ini, kesadaran etis masyarakat menjadi sangat penting agar setiap orang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam.

Dalam perspektif filsafat moral, etika lingkungan berkembang sebagai respons terhadap berbagai krisis ekologis yang muncul akibat perkembangan industri dan teknologi modern. Para pemikir etika menekankan bahwa hubungan antara manusia dan alam harus didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kehidupan serta tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, etika lingkungan tidak hanya berbicara tentang perlindungan alam, tetapi juga tentang perubahan cara pandang manusia terhadap lingkungan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip etika lingkungan, manusia diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis dengan alam. Etika lingkungan mendorong

manusia untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, etika lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.<sup>37</sup>

#### vi) Kritik ideologi

Kritik ideologi merupakan salah satu bagian penting dalam etika sosial yang berfungsi untuk menilai secara kritis berbagai pandangan dunia, sistem pemikiran, atau ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Ideologi pada dasarnya adalah seperangkat gagasan, nilai, dan keyakinan yang digunakan oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk memahami realitas sosial serta mengarahkan tindakan mereka. Dalam kehidupan sosial dan politik, ideologi sering kali mempengaruhi cara manusia berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, etika sosial memandang penting adanya sikap kritis terhadap ideologi agar nilai-nilai moral tetap menjadi dasar dalam kehidupan bersama.<sup>38</sup>

Dalam sistematika etika, etika sosial membahas hubungan manusia dengan sesama manusia serta berbagai struktur sosial yang memengaruhi kehidupan bersama, seperti keluarga, masyarakat, negara, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Selain itu, etika sosial juga mengajak manusia untuk bersikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Sikap kritis ini diperlukan karena tidak semua ideologi selalu sejalan dengan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kritik ideologi bertujuan untuk menilai apakah

---

37 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 38.

38 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.11.

suatu ideologi benar-benar mendukung kehidupan manusia yang bermoral atau justru merugikan sebagian pihak.

Kritik ideologi dalam etika tidak dimaksudkan untuk menolak seluruh ideologi yang ada, melainkan untuk melakukan refleksi moral terhadap ideologi tersebut. Setiap ideologi biasanya lahir dari kondisi sosial, sejarah, dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ideologi dapat mengandung nilai-nilai positif, tetapi juga berpotensi mengandung kelemahan atau bahkan ketidakadilan. Dalam beberapa kasus, ideologi dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan kelompok tertentu, misalnya ketika suatu kebijakan hanya menguntungkan kelompok mayoritas dan mengabaikan hak-hak kelompok minoritas.<sup>39</sup> Salah satu tujuan utama kritik ideologi adalah untuk mengungkap kemungkinan adanya manipulasi atau penyalahgunaan ideologi dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, ideologi sering kali digunakan untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat sehingga mereka menerima suatu keadaan sebagai sesuatu yang wajar, meskipun keadaan tersebut sebenarnya tidak adil. Dalam situasi seperti ini, etika sosial berperan untuk mempertanyakan kembali nilai-nilai yang mendasari ideologi tersebut dan menilai apakah ideologi tersebut benar-benar mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kritik ideologi juga membantu masyarakat untuk menyadari bahwa nilai-nilai moral tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh ideologi tertentu. Perilaku etis seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti keluarga, lingkungan sosial, kebudayaan, dan agama. Faktor-faktor tersebut turut membentuk kesadaran moral seseorang

---

39 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 102.

serta memengaruhi cara individu menilai baik atau buruk suatu tindakan.

Dalam perspektif filsafat moral, kritik ideologi berfungsi sebagai sarana refleksi kritis untuk menilai apakah suatu sistem pemikiran atau kebijakan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Melalui kritik ideologi, masyarakat diajak untuk tidak menerima suatu pandangan secara begitu saja, tetapi melakukan penilaian secara rasional dan moral. Sikap kritis ini penting agar manusia tidak terjebak dalam sistem pemikiran yang dapat membatasi kebebasan, menimbulkan ketidakadilan, atau mengabaikan martabat manusia.

Dengan demikian, kritik ideologi memiliki peran penting dalam etika sosial karena membantu manusia untuk menilai secara kritis berbagai pandangan dunia yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan etis, ideologi dapat dievaluasi berdasarkan nilai-nilai moral seperti keadilan, kebenaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan cara ini, etika sosial berupaya memastikan bahwa berbagai sistem pemikiran dan kebijakan sosial yang berkembang dalam masyarakat tetap berorientasi pada kesejahteraan bersama serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan.<sup>40</sup>

## C. ETIKA SEBAGAI CABANG FILSAFAT

### 1. Etika Deskriptif

Etika sebagai cabang filsafat tidak hanya berusaha menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, tetapi juga berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana nilai-nilai moral berkembang dalam kehidupan manusia. Salah satu pendekatan penting dalam kajian etika adalah etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan pendekatan dalam etika yang berusaha menggambarkan atau

---

40 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 41.

melukiskan fenomena moral sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian apakah tindakan tersebut benar atau salah secara normatif.

Dalam pengertian ini, etika deskriptif berfokus pada pengamatan terhadap fakta-fakta moral yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini mempelajari kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai, serta pandangan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau buruk dalam suatu kebudayaan tertentu. Dengan demikian, etika deskriptif berusaha memahami realitas moral yang berkembang dalam masyarakat melalui pendekatan yang bersifat empiris dan deskriptif. Dalam kajian filsafat moral, pendekatan ini sangat penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana manusia dalam berbagai masyarakat mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.<sup>41</sup>

Etika deskriptif tidak berusaha menetapkan norma moral baru atau menentukan standar moral yang harus diikuti oleh manusia. Sebaliknya, etika deskriptif hanya berusaha menjelaskan dan melaporkan fenomena moral yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini mempelajari berbagai bentuk perilaku manusia yang berkaitan dengan moralitas, termasuk adat kebiasaan, tradisi, serta keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Dengan demikian, etika deskriptif memberikan gambaran yang objektif mengenai bagaimana nilai-nilai moral dipahami dan diterapkan dalam berbagai kebudayaan.

Pendekatan etika deskriptif sering kali digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi. Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat mempelajari bagaimana sistem nilai dan norma moral berkembang dalam masyarakat tertentu. Misalnya, suatu masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep kejujuran, tanggung jawab, atau kewajiban sosial dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Etika deskriptif tidak menilai apakah pandangan tersebut benar atau salah, tetapi berusaha memahami latar belakang budaya, sosial, dan historis yang membentuk pandangan tersebut.

---

41 Sulistyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.17.

Selain itu, etika deskriptif juga membantu menjelaskan bagaimana perilaku moral manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Perilaku etis seseorang tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan rasional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, kebudayaan, serta nilai-nilai yang berkembang dalam kelompok sosialnya. Faktor-faktor tersebut membentuk cara individu memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, etika deskriptif berusaha menggambarkan hubungan antara moralitas manusia dengan konteks sosial dan budaya tempat manusia tersebut hidup.<sup>42</sup>

Dalam kajian filsafat moral, etika deskriptif biasanya dibedakan dari etika normatif dan metaetika. Etika normatif berusaha menentukan prinsip-prinsip moral yang seharusnya dijadikan pedoman dalam bertindak, sedangkan metaetika berfokus pada analisis terhadap makna konsep-konsep moral seperti nilai, norma, keadilan, dan kewajiban. Berbeda dengan kedua pendekatan tersebut, etika deskriptif lebih menekankan pada penggambaran realitas moral yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan dasar empiris yang penting bagi pengembangan teori-teori etika yang lebih sistematis.

Dengan demikian, etika deskriptif memiliki peran penting dalam memahami dinamika moralitas manusia dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, para ahli dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana nilai-nilai moral berkembang dalam berbagai budaya dan masyarakat. Pengetahuan tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi refleksi etis yang lebih mendalam mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan bersama.<sup>43</sup>

## 2. Etika Normatif

Selain etika deskriptif, dalam kajian filsafat moral dikenal pula pendekatan yang disebut etika normatif. Jika etika deskriptif berusaha menggambarkan fakta-fakta moral sebagaimana terjadi

---

42 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.40.

43 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 27.

dalam kehidupan masyarakat, maka etika normatif berusaha menentukan prinsip-prinsip atau norma yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia dalam bertindak. Dengan kata lain, etika normatif tidak hanya menjelaskan bagaimana manusia bertindak, tetapi juga mempertanyakan bagaimana manusia seharusnya bertindak berdasarkan pertimbangan moral yang rasional.

Etika normatif merupakan bagian penting dari filsafat moral karena berfungsi untuk merumuskan standar atau ukuran yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk, benar atau salah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai pilihan tindakan yang memerlukan pertimbangan moral. Oleh karena itu, etika normatif berusaha memberikan dasar rasional bagi manusia dalam menentukan tindakan yang paling tepat dan bertanggung jawab secara moral.<sup>44</sup>

Dalam etika normatif, para filsuf berusaha merumuskan prinsip-prinsip moral yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan. Prinsip-prinsip tersebut biasanya berkaitan dengan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui prinsip-prinsip ini, manusia dapat menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama.

Salah satu ciri utama etika normatif adalah sifatnya yang preskriptif, yaitu memberikan pedoman atau aturan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, etika normatif tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Etika normatif membantu individu dan masyarakat untuk mengambil keputusan moral yang tepat, terutama ketika mereka menghadapi situasi yang kompleks dan penuh dilema.

---

44 Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.18.

Dalam sejarah filsafat, terdapat berbagai teori yang berkembang dalam etika normatif. Beberapa teori menekankan pentingnya konsekuensi dari suatu tindakan, sementara teori lainnya lebih menekankan kewajiban moral atau karakter moral individu. Misalnya, teori utilitarianisme menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat atau akibat yang dihasilkan bagi kebahagiaan banyak orang, sedangkan teori deontologi menekankan bahwa suatu tindakan harus dinilai berdasarkan kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Selain itu, terdapat pula pendekatan etika kebajikan yang menekankan pembentukan karakter moral yang baik sebagai dasar bagi tindakan yang benar.<sup>45</sup>

Dalam konteks kehidupan profesional, etika normatif memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penyusunan kode etik profesi. Setiap profesi pada umumnya memiliki standar moral tertentu yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Standar tersebut bertujuan untuk menjaga integritas profesi serta melindungi kepentingan masyarakat yang dilayani oleh profesi tersebut. Oleh karena itu, etika normatif menjadi landasan bagi pengembangan etika profesi di berbagai bidang, seperti bisnis, hukum, kedokteran, dan pariwisata.

Etika normatif juga membantu manusia untuk melakukan refleksi moral terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip etika normatif, seseorang dapat mempertimbangkan apakah suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, etika normatif tidak hanya memberikan aturan moral, tetapi juga mendorong manusia untuk berpikir secara kritis dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan.<sup>46</sup>

Dengan demikian, etika normatif merupakan bagian penting dari kajian etika sebagai cabang filsafat. Pendekatan ini berusaha

---

45 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 65–66.

46 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 14.

merumuskan prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia dalam bertindak secara benar dan bertanggung jawab. Melalui etika normatif, manusia diajak untuk tidak hanya memahami realitas moral yang ada, tetapi juga berupaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai moral yang rasional dan universal.

### 3. Metaetika

Selain etika deskriptif dan etika normatif, dalam kajian filsafat moral dikenal pula cabang etika yang disebut metaetika. Metaetika merupakan bidang kajian yang berusaha menganalisis secara lebih mendalam konsep-konsep moral yang digunakan dalam pembahasan etika. Jika etika deskriptif menggambarkan fakta-fakta moral dalam masyarakat dan etika normatif menetapkan prinsip-prinsip moral yang seharusnya diikuti manusia, maka metaetika berfokus pada analisis mengenai makna, dasar, dan sifat dari pernyataan-pernyataan moral itu sendiri.

Metaetika pada dasarnya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai moralitas. Misalnya, apa yang dimaksud dengan istilah “baik” dan “buruk”? Apakah nilai moral bersifat objektif atau hanya merupakan hasil kesepakatan manusia? Bagaimana manusia dapat mengetahui bahwa suatu tindakan benar atau salah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa metaetika tidak secara langsung membahas tindakan moral tertentu, tetapi lebih meneliti bahasa, konsep, dan dasar pemikiran yang digunakan dalam etika.<sup>47</sup>

Dalam metaetika, perhatian utama diberikan pada analisis terhadap istilah-istilah moral yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kewajiban, tanggung jawab, keadilan, kebaikan, dan keburukan. Para filsuf mencoba memahami apakah istilah-istilah tersebut memiliki makna yang bersifat universal atautkah bergantung pada konteks budaya dan pengalaman manusia. Dengan demikian, metaetika membantu memperjelas konsep-konsep moral sehingga

---

<sup>47</sup> Sulistiyo-Basuki, *Etika Profesi Kearsipan Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.18–1.19.

pembahasan etika dapat dilakukan secara lebih sistematis dan rasional.

Selain menganalisis makna istilah moral, metaetika juga meneliti dasar pengetahuan moral manusia. Dalam hal ini muncul pertanyaan mengenai bagaimana manusia dapat mengetahui nilai-nilai moral. Sebagian pemikir berpendapat bahwa nilai moral dapat diketahui melalui akal budi dan refleksi rasional, sedangkan pemikir lainnya menekankan peran perasaan moral, intuisi, atau pengalaman sosial dalam membentuk pengetahuan moral. Perdebatan ini menunjukkan bahwa moralitas tidak hanya berkaitan dengan aturan perilaku, tetapi juga dengan cara manusia memahami dan menilai tindakan mereka sendiri.<sup>48</sup>

Metaetika juga berkaitan dengan persoalan mengenai objektivitas nilai moral. Sebagian filsuf berpendapat bahwa nilai moral memiliki dasar yang objektif dan berlaku secara universal bagi semua manusia. Pandangan ini menegaskan bahwa tindakan seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan nilai yang seharusnya diakui oleh semua orang. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa nilai moral bersifat relatif karena dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan kondisi sosial tertentu. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu topik utama dalam kajian metaetika.

Dalam konteks etika profesi, pemahaman mengenai metaetika sangat penting karena membantu para profesional untuk memahami dasar moral dari berbagai aturan dan kode etik yang berlaku dalam profesi mereka. Kode etik profesi tidak hanya berisi aturan praktis mengenai perilaku yang diperbolehkan atau dilarang, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai moral tertentu seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Dengan memahami dasar-dasar metaetika, seseorang dapat memahami alasan moral di balik aturan-aturan tersebut serta mampu menerapkannya secara lebih bijaksana dalam praktik profesional.<sup>49</sup>

---

48 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 16–18.

49 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 13–15.

Selain itu, metaetika juga mendorong manusia untuk melakukan refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami makna dan dasar dari konsep-konsep moral, manusia dapat menghindari kesalahpahaman dalam menilai tindakan serta mampu membuat keputusan moral yang lebih rasional. Hal ini sangat penting terutama dalam kehidupan modern yang sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan moral yang kompleks.

Dengan demikian, metaetika merupakan bagian penting dari etika sebagai cabang filsafat. Melalui analisis terhadap konsep, bahasa, dan dasar pemikiran moral, metaetika membantu memperjelas makna dari nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi tindakan manusia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep moral tersebut, manusia diharapkan mampu bertindak secara lebih sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

### A. SISTEM FILSAFAT MORAL

#### 1. Deontologi

Salah satu teori penting dalam filsafat moral yang banyak dibahas dalam kajian etika adalah deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani *deon* yang berarti “kewajiban” atau “apa yang harus dilakukan”, dan *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, deontologi dapat dipahami sebagai teori

etika yang menekankan kewajiban moral sebagai dasar utama dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Dalam pandangan ini, suatu tindakan dianggap bermoral bukan karena hasil atau akibat yang ditimbulkannya, melainkan karena tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban moral yang benar.

Teori etika deontologi menegaskan bahwa nilai moral suatu tindakan terletak pada niat atau motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Jika seseorang melakukan suatu tindakan karena kesadaran akan kewajiban moral, maka tindakan tersebut memiliki nilai moral yang tinggi. Sebaliknya, apabila suatu tindakan dilakukan



<https://www.kompasiana.com/katakavin/64088ede-08a8b51b935107b5/filsafat-etika-macam-macam-etika-dan-aliran-alirannya>

semata-mata demi keuntungan pribadi atau karena tekanan dari luar, maka tindakan tersebut tidak memiliki nilai moral yang sejati, meskipun mungkin menghasilkan akibat yang baik. Oleh karena itu, dalam pandangan deontologi, motivasi moral menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan nilai suatu tindakan.<sup>50</sup>

Salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori deontologi adalah filsuf Jerman Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban, bukan karena dorongan kepentingan pribadi ataupun karena pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh. Kant menekankan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan prinsip moral yang bersifat universal, yang dikenal dengan istilah imperatif kategoris (*categorical imperative*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga prinsip yang menjadi dasar tindakannya dapat dijadikan sebagai hukum universal bagi semua orang. Dengan kata lain, tindakan yang benar adalah tindakan yang dapat diterima sebagai aturan umum bagi seluruh manusia.

Dalam kerangka ini, deontologi menempatkan kewajiban moral sebagai dasar utama dalam bertindak. Seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang salah meskipun tindakan tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat yang besar. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan tidak dapat digunakan untuk membenarkan segala cara. Dalam banyak situasi kehidupan, manusia sering dihadapkan pada pilihan antara mengikuti prinsip moral atau mengejar keuntungan praktis. Deontologi menegaskan bahwa kewajiban moral harus tetap diutamakan meskipun pilihan tersebut mungkin membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan secara praktis.

Dalam konteks kehidupan profesional, teori deontologi memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan konsep tanggung jawab dan kewajiban profesi. Setiap profesi pada

---

50 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.35.

dasarnya memiliki standar moral tertentu yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Standar tersebut biasanya dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi yang mengatur perilaku para profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengikuti prinsip deontologi, seorang profesional diharapkan mampu menjalankan pekerjaannya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kewajiban moral yang melekat pada profesinya.

Sebagai contoh, dalam profesi kearsipan, seorang arsiparis memiliki kewajiban moral untuk memberikan layanan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Seorang arsiparis harus melayani kebutuhan informasi pengguna arsip dengan baik selama arsip tersebut tidak termasuk dalam kategori arsip rahasia atau terbatas. Dalam situasi ini, tindakan melayani pengguna arsip dilakukan bukan semata-mata demi keuntungan pribadi, tetapi karena adanya kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan dan prinsip etika profesi.<sup>51</sup>

Meskipun teori deontologi menekankan pentingnya kewajiban moral, teori ini juga tidak terlepas dari berbagai kritik. Salah satu kritik yang sering diajukan adalah bahwa deontologi terkadang terlalu kaku karena hanya menekankan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan secara memadai akibat dari suatu tindakan. Dalam situasi tertentu, penerapan aturan moral secara ketat dapat menimbulkan dilema etis yang sulit diselesaikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa pemikir etika seperti W. D. Ross mengembangkan konsep *prima facie* duties, yaitu gagasan bahwa manusia memiliki berbagai kewajiban moral yang harus dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap situasi. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat menentukan kewajiban moral mana yang paling kuat dan paling relevan dalam situasi tertentu.

Dengan demikian, teori deontologi memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan filsafat moral. Teori ini menekankan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada

---

51 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.36.

kewajiban dan prinsip moral yang rasional, bukan semata-mata pada pertimbangan keuntungan atau akibat yang dihasilkan. Dalam kehidupan profesional, prinsip deontologi menjadi dasar penting bagi pembentukan kode etik yang mengatur perilaku para profesional agar tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, profesi dapat menjalankan fungsinya secara bermoral serta memberikan pelayanan yang adil dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

## 2. Teleologi

### a. Egoisme

Dalam kajian filsafat moral, salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk menilai tindakan manusia adalah **teleologi**. Istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani *telos* yang berarti tujuan atau hasil akhir. Oleh karena itu, teori teleologis merupakan teori etika yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Dalam pandangan ini, suatu tindakan dianggap benar apabila menghasilkan akibat yang baik atau membawa manfaat tertentu. Sebaliknya, tindakan dianggap salah apabila menimbulkan akibat yang merugikan atau tidak memberikan manfaat yang diharapkan.<sup>52</sup>

Pendekatan teleologis berbeda dengan teori **deontologi** yang menekankan kewajiban moral sebagai dasar penilaian tindakan. Jika deontologi berfokus pada kewajiban dan prinsip moral yang harus ditaati, maka teleologi lebih menekankan hasil atau konsekuensi dari tindakan manusia. Dalam kerangka teleologis, nilai moral suatu tindakan sangat ditentukan oleh dampak atau tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut.

---

<sup>52</sup> Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.36–1.37

Salah satu bentuk teori teleologis yang paling awal dan sederhana adalah **egoisme etis**. Egoisme etis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam pandangan ini, setiap individu secara moral dibenarkan untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri, selama tindakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, egoisme etis menilai bahwa tindakan yang paling baik adalah tindakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi pelakunya.

Egoisme etis berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan alami untuk memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan ini dapat terlihat dalam berbagai keputusan yang diambil oleh individu, seperti dalam memilih pekerjaan, mengelola usaha, atau mengambil keputusan ekonomi yang menguntungkan dirinya sendiri.

Namun demikian, egoisme etis tidak selalu identik dengan sikap egois yang merugikan orang lain. Beberapa pemikir yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa dalam banyak situasi, kepentingan pribadi justru dapat mendorong seseorang untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab. Misalnya, seorang pelaku usaha yang ingin mempertahankan reputasi bisnisnya akan berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dalam situasi ini, kepentingan pribadi untuk mempertahankan usaha justru mendorong perilaku yang bermanfaat bagi orang lain.<sup>53</sup>

Meskipun demikian, teori egoisme etis juga mendapat banyak kritik dari para filsuf moral. Salah satu kritik utama terhadap egoisme etis adalah bahwa teori ini

---

53 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 83–85.

terlalu menekankan kepentingan individu dan kurang memperhatikan kepentingan orang lain maupun kepentingan bersama. Jika setiap orang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain, maka kehidupan sosial dapat menjadi tidak harmonis dan penuh konflik. Oleh karena itu, banyak pemikir etika berpendapat bahwa kepentingan individu harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab moral terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks etika profesi, pandangan egoisme etis juga perlu dipahami secara kritis. Seorang profesional tentu memiliki kepentingan pribadi, seperti memperoleh penghasilan, mengembangkan karier, atau mencapai keberhasilan dalam pekerjaannya. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh mengabaikan tanggung jawab moral terhadap klien, masyarakat, maupun profesi itu sendiri. Oleh karena itu, kode etik profesi biasanya menekankan bahwa kepentingan publik dan integritas profesi harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.<sup>54</sup>

Dengan demikian, egoisme etis merupakan salah satu teori dalam pendekatan teleologis yang menilai tindakan moral berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh individu. Meskipun pandangan ini mengakui pentingnya kepentingan pribadi dalam kehidupan manusia, teori ini juga menimbulkan berbagai perdebatan dalam filsafat moral, terutama berkaitan dengan hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dalam kajian etika profesi, pemahaman mengenai egoisme etis penting untuk membantu para profesional menyadari batas-batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

#### b. Utilitarianisme

Salah satu teori etika yang sangat berpengaruh dalam tradisi filsafat moral, khususnya dalam kerangka pendekatan

---

54 *Global Code of Ethics for Tourism, World Tourism Organization (UNWTO), 1999.*

teleologis, adalah utilitarianisme. Teori ini menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat atau kegunaan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Istilah utilitarianisme berasal dari kata *utility* yang berarti kegunaan atau manfaat. Oleh karena itu, dalam pandangan utilitarianisme, tindakan yang dianggap benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Utilitarianisme berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 terutama melalui pemikiran dua filsuf Inggris, yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham berpendapat bahwa tujuan utama dari tindakan manusia adalah mencapai kesenangan (*pleasure*) dan menghindari penderitaan (*pain*). Oleh karena itu, menurut Bentham, suatu tindakan dapat dinilai baik apabila tindakan tersebut mampu meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi banyak orang. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*", yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam teori utilitarianisme.<sup>55</sup>

Dalam kerangka utilitarianisme, tindakan moral tidak dinilai berdasarkan niat atau kewajiban semata, melainkan berdasarkan konsekuensi atau hasil yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Jika suatu tindakan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugiannya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang benar secara moral. Sebaliknya, jika tindakan tersebut menimbulkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan, maka tindakan tersebut dinilai tidak bermoral.

John Stuart Mill kemudian mengembangkan pemikiran Bentham dengan memberikan penekanan yang lebih mendalam pada kualitas kebahagiaan. Menurut Mill, tidak

---

55 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.37–1.38.

semua bentuk kesenangan memiliki nilai yang sama. Ia membedakan antara kesenangan yang bersifat rendah, seperti kenikmatan fisik, dan kesenangan yang lebih tinggi, seperti kebahagiaan intelektual dan moral. Dengan demikian, Mill berpendapat bahwa kebahagiaan yang berkaitan dengan perkembangan intelektual dan moral manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesenangan yang hanya bersifat jasmani.

Dalam praktik kehidupan sosial, utilitarianisme sering digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Misalnya dalam kebijakan publik, suatu kebijakan dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas. Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi publik, di mana keputusan sering kali diambil berdasarkan pertimbangan mengenai manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks etika profesi, utilitarianisme juga memiliki peranan penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan profesional. Seorang profesional sering kali dihadapkan pada berbagai pilihan tindakan yang memiliki dampak bagi banyak pihak, seperti klien, masyarakat, maupun institusi tempat ia bekerja. Oleh karena itu, pendekatan utilitarianisme dapat membantu seorang profesional untuk mempertimbangkan dampak yang paling luas dari suatu keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sebagai contoh, dalam bidang pariwisata, pengembangan suatu destinasi wisata harus mempertimbangkan manfaat yang diperoleh oleh berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, pelaku usaha, pemerintah, serta wisatawan. Kebijakan yang diambil seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat tanpa merusak lingkungan atau mengabaikan nilai-nilai budaya setempat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan utilitarianisme yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan bersama dalam setiap tindakan atau kebijakan yang diambil.<sup>56</sup>

Meskipun utilitarianisme memiliki pengaruh yang besar dalam teori etika, teori ini juga tidak terlepas dari kritik. Salah satu kritik utama terhadap utilitarianisme adalah bahwa teori ini terkadang dapat mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan mayoritas. Dalam situasi tertentu, keputusan yang memberikan manfaat bagi banyak orang mungkin saja merugikan sebagian kecil individu. Oleh karena itu, para pemikir etika berpendapat bahwa penerapan utilitarianisme perlu diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta prinsip keadilan.

Dengan demikian, utilitarianisme merupakan salah satu teori etika yang sangat penting dalam pendekatan teleologis. Teori ini menekankan bahwa tindakan moral harus dinilai berdasarkan manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam kehidupan profesional, pemahaman mengenai utilitarianisme dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas serta mendorong terciptanya tindakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

### 3. Relativisme Etis

Dalam kajian filsafat moral, selain teori deontologi dan teleologi, terdapat pula pendekatan yang dikenal sebagai **relativisme etis**. Relativisme etis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa nilai-nilai moral tidak bersifat mutlak atau universal, melainkan bergantung pada konteks tertentu seperti budaya, tradisi, masyarakat, dan situasi yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain,

---

<sup>56</sup> World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999).

apa yang dianggap baik atau buruk oleh suatu kelompok masyarakat belum tentu dianggap sama oleh kelompok masyarakat lainnya.

Pandangan relativisme etis muncul dari pengamatan bahwa dalam berbagai kebudayaan di dunia terdapat perbedaan yang cukup besar dalam cara masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai moral. Setiap masyarakat memiliki norma, adat istiadat, dan sistem nilai yang berkembang sesuai dengan sejarah serta kondisi sosial budaya mereka. Oleh karena itu, relativisme etis berpendapat bahwa tidak ada standar moral tunggal yang dapat diterapkan secara universal kepada seluruh manusia.<sup>57</sup>

Dalam perspektif relativisme etis, suatu tindakan tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai benar atau salah tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya tempat tindakan tersebut dilakukan. Misalnya, praktik-praktik tertentu dalam suatu budaya mungkin dianggap wajar dan bermoral oleh masyarakat setempat, tetapi dapat dianggap tidak sesuai oleh masyarakat dari budaya lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa nilai moral sering kali dibentuk oleh tradisi, kebiasaan, serta pandangan hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat.

Relativisme etis sering dikaitkan dengan pendekatan antropologis dalam memahami moralitas manusia. Para antropolog menemukan bahwa berbagai masyarakat di dunia memiliki sistem nilai yang berbeda-beda, terutama dalam hal hubungan sosial, struktur keluarga, dan aturan perilaku. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa moralitas tidak selalu bersifat universal, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan sejarah suatu masyarakat. Oleh karena itu, relativisme etis mendorong sikap saling menghargai terhadap keberagaman nilai moral yang terdapat dalam berbagai kebudayaan.<sup>58</sup>

Namun demikian, relativisme etis juga menimbulkan sejumlah perdebatan dalam filsafat moral. Salah satu kritik yang sering

---

57 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.38–1.39.

58 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 121–123.

diajukan terhadap relativisme etis adalah bahwa pandangan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan standar moral yang jelas. Jika semua nilai moral dianggap relatif dan bergantung pada budaya tertentu, maka akan sulit untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar adil atau tidak. Selain itu, relativisme etis juga dapat menimbulkan kesulitan dalam mengkritik praktik-praktik sosial yang merugikan manusia, seperti diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks kehidupan profesional, relativisme etis juga menjadi topik penting untuk dipahami. Para profesional sering kali bekerja dalam lingkungan yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa nilai-nilai moral dapat dipahami secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat. Dalam bidang pariwisata misalnya, para pelaku industri pariwisata harus menghormati nilai-nilai budaya lokal serta tradisi masyarakat setempat ketika menjalankan kegiatan pariwisata. Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai pedoman etika internasional yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap keragaman budaya dan nilai-nilai masyarakat lokal.<sup>59</sup>

Meskipun demikian, relativisme etis tidak berarti bahwa semua tindakan dapat dibenarkan. Banyak pemikir etika berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya dalam memahami moralitas, tetap diperlukan prinsip-prinsip moral dasar yang dapat melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pendekatan relativisme etis sering dipadukan dengan prinsip-prinsip etika universal seperti keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, relativisme etis memberikan perspektif penting dalam memahami keragaman nilai moral yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pandangan ini membantu manusia untuk lebih terbuka terhadap perbedaan budaya dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Namun pada saat yang sama, pemahaman mengenai relativisme etis juga perlu diimbangi dengan

---

59 World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999).

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral yang dapat melindungi kepentingan bersama serta menjaga martabat manusia dalam kehidupan sosial dan profesional.

## **B. KEGUNAAN TEORI ETIKA**

Teori etika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial dan profesional. Melalui teori etika, manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dalam menilai tindakan manusia. Teori etika tidak hanya memberikan penjelasan mengenai konsep baik dan buruk, tetapi juga membantu manusia untuk menentukan bagaimana seharusnya bertindak dalam berbagai situasi kehidupan yang sering kali kompleks dan penuh pertimbangan moral.

Salah satu kegunaan utama teori etika adalah memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami persoalan-persoalan moral. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai pilihan tindakan yang menimbulkan dilema etis. Dalam situasi seperti ini, teori etika dapat membantu seseorang untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindakan tersebut, seperti kewajiban moral, konsekuensi dari tindakan, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya kerangka pemikiran yang jelas, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab.<sup>60</sup>

Selain itu, teori etika juga berfungsi sebagai dasar dalam menilai dan mengevaluasi perilaku manusia. Melalui teori etika, seseorang dapat menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bermoral atau tidak. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga pada pertimbangan rasional mengenai nilai-nilai moral yang mendasari tindakan tersebut. Dengan demikian, teori etika membantu manusia untuk tidak hanya mengikuti norma

---

60 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.39–1.40.

yang ada secara mekanis, tetapi juga memahami alasan moral di balik norma tersebut.

Kegunaan lain dari teori etika adalah membantu manusia dalam memahami dan menyelesaikan konflik moral. Dalam kehidupan sosial, sering kali terjadi perbedaan pandangan mengenai apa yang dianggap benar atau salah. Perbedaan tersebut dapat muncul karena latar belakang budaya, nilai-nilai pribadi, maupun kepentingan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, teori etika dapat menjadi alat analisis yang membantu individu maupun kelompok untuk memahami berbagai sudut pandang yang ada serta mencari solusi yang dapat diterima secara moral.

Dalam konteks kehidupan profesional, teori etika memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pembentukan dan penerapan etika profesi. Setiap profesi pada umumnya memiliki kode etik yang mengatur perilaku para anggotanya. Kode etik tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dikembangkan dalam teori etika. Melalui pemahaman terhadap teori etika, seorang profesional dapat memahami makna dan tujuan dari aturan-aturan yang terdapat dalam kode etik profesinya, sehingga ia dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.<sup>61</sup>

Selain itu, teori etika juga berfungsi sebagai sarana refleksi moral bagi individu maupun masyarakat. Dengan mempelajari teori etika, seseorang diajak untuk berpikir secara kritis mengenai nilai-nilai moral yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi ini penting karena nilai-nilai moral tidak selalu bersifat statis, melainkan dapat berkembang seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui refleksi moral yang didasarkan pada teori etika, manusia dapat menilai kembali praktik-praktik sosial yang ada serta berusaha mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.

---

61 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 22–24.

Dalam dunia profesional modern, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti hukum, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata, teori etika membantu para profesional untuk mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Misalnya, dalam industri pariwisata, kegiatan pariwisata tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan berbagai pedoman etika internasional yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan kegiatan pariwisata.<sup>62</sup>

Dengan demikian, teori etika memiliki berbagai kegunaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Teori etika tidak hanya memberikan dasar konseptual dalam memahami nilai-nilai moral, tetapi juga membantu manusia dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, menyelesaikan konflik moral, serta menjalankan profesi secara bermoral. Melalui pemahaman yang baik terhadap teori etika, manusia diharapkan mampu mengembangkan sikap moral yang lebih matang serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil, harmonis, dan bermartabat.

## C. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRILAKU ETIS

### 1. Diri Sendiri

Perilaku etis seseorang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk cara individu berpikir, menilai, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan perilaku etis adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Faktor internal ini berkaitan dengan nilai-nilai pribadi, karakter, kesadaran moral, serta kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang bermoral.

Diri sendiri sebagai faktor yang memengaruhi perilaku etis mencakup berbagai aspek yang melekat dalam kepribadian

---

62 World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999).

seseorang. Aspek tersebut antara lain meliputi nilai moral yang diyakini, tingkat kesadaran etis, integritas pribadi, serta kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Nilai-nilai tersebut biasanya terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan, pengalaman hidup, serta refleksi pribadi terhadap berbagai situasi moral yang dihadapi seseorang. Oleh karena itu, setiap individu dapat memiliki tingkat kesadaran moral yang berbeda-beda dalam menilai suatu tindakan.<sup>63</sup>

Salah satu unsur penting dari faktor diri sendiri adalah integritas pribadi. Integritas merupakan kualitas moral yang menunjukkan kesesuaian antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Seseorang yang memiliki integritas tinggi akan berusaha untuk bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, meskipun ia berada dalam situasi yang sulit atau menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya. Integritas pribadi sangat penting terutama dalam kehidupan profesional, karena menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap seseorang yang menjalankan profesinya.

Selain integritas, kesadaran moral juga menjadi bagian penting dari faktor internal yang memengaruhi perilaku etis. Kesadaran moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami bahwa suatu tindakan memiliki dimensi moral dan dapat berdampak pada orang lain. Individu yang memiliki kesadaran moral yang baik akan lebih peka terhadap nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan sebelum mengambil keputusan.

Dalam kajian filsafat moral, perkembangan kesadaran etis seseorang juga berkaitan dengan kemampuan berpikir moral. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir moral yang baik akan mampu mempertimbangkan berbagai aspek dari suatu persoalan etika, seperti kewajiban moral, konsekuensi tindakan, serta kepentingan pihak lain yang terlibat. Dengan demikian,

---

63 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.40–1.41.

individu tersebut tidak hanya bertindak berdasarkan dorongan emosional atau kepentingan pribadi semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan moral yang rasional.

Faktor diri sendiri juga berkaitan dengan motivasi pribadi dalam bertindak. Motivasi ini dapat berasal dari keinginan untuk mempertahankan harga diri, menjaga reputasi, atau menjalankan nilai-nilai moral yang diyakini sebagai prinsip hidup. Dalam banyak kasus, individu yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai moral akan tetap berusaha untuk bertindak secara etis meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral.

Dalam konteks etika profesi, faktor diri sendiri memiliki peranan yang sangat penting karena seorang profesional sering kali dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut keputusan moral. Kode etik profesi memang memberikan pedoman mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan, namun pada akhirnya keputusan untuk bertindak secara etis tetap berada pada individu yang menjalankan profesi tersebut. Oleh karena itu, integritas pribadi, kesadaran moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika menjadi unsur yang sangat menentukan dalam menjaga profesionalitas seseorang.

Selain itu, faktor internal juga memengaruhi bagaimana seseorang merespons tekanan dari lingkungan kerja. Dalam dunia profesional modern, seseorang sering kali menghadapi berbagai tekanan seperti tuntutan target kerja, persaingan, maupun kepentingan ekonomi. Individu yang memiliki landasan moral yang kuat cenderung lebih mampu mempertahankan perilaku etis meskipun berada dalam situasi yang menantang. Sebaliknya, individu yang memiliki komitmen moral yang lemah lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang melanggar prinsip etika.

Dengan demikian, faktor diri sendiri merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam membentuk perilaku etis seseorang. Nilai-nilai pribadi, integritas, kesadaran moral, serta kemampuan berpikir etis merupakan dasar utama yang menentukan bagaimana seseorang bertindak dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh karena

itu, pengembangan karakter moral dan kesadaran etis menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan maupun dalam pembentukan profesional yang bertanggung jawab.<sup>64</sup>

## 2. Keluarga

Selain faktor yang berasal dari diri sendiri, perilaku etis seseorang juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh individu sejak lahir dan menjadi tempat awal bagi seseorang untuk belajar mengenai nilai-nilai moral, norma sosial, serta pola perilaku yang dianggap benar atau salah. Dalam keluarga, seorang anak mulai mengenal konsep tentang kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, serta berbagai nilai moral lainnya yang akan membentuk karakter pribadinya di kemudian hari.

Peran keluarga dalam pembentukan perilaku etis sangat penting karena dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi moral yang berlangsung secara terus-menerus. Orang tua atau anggota keluarga lainnya berperan sebagai teladan yang memberikan contoh mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi sehari-hari, anak belajar memahami nilai-nilai yang dihargai oleh keluarga, seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut secara bertahap akan tertanam dalam diri individu dan memengaruhi cara ia bertindak dalam berbagai situasi kehidupan.<sup>65</sup>

Selain melalui teladan, keluarga juga membentuk perilaku etis melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Orang tua biasanya memberikan arahan, nasihat, maupun aturan tertentu yang bertujuan untuk membimbing anak dalam memahami mana tindakan yang baik dan mana yang tidak baik. Misalnya, anak diajarkan untuk berkata jujur, menghormati orang lain, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Proses pembelajaran moral ini membantu

---

64 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 28–30.

65 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.41–1.42.

individu untuk mengembangkan kemampuan dalam menilai tindakan secara etis dan membentuk dasar bagi perkembangan kesadaran moralnya.

Dalam perkembangan moral seseorang, keluarga juga berperan dalam membentuk sikap empati dan kepedulian terhadap orang lain. Melalui hubungan emosional yang terjalin dalam keluarga, individu belajar memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Sikap empati ini sangat penting dalam pembentukan perilaku etis karena membantu seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap orang lain. Dengan adanya empati, seseorang akan lebih cenderung bertindak secara adil, menghargai hak orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Para ahli etika dan psikologi moral juga menekankan bahwa pengalaman yang diperoleh dalam lingkungan keluarga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan karakter moral seseorang. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, cara keluarga menyelesaikan konflik, serta nilai-nilai yang ditekankan dalam kehidupan keluarga akan membentuk cara pandang individu terhadap berbagai persoalan moral. Individu yang tumbuh dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai moral yang kuat biasanya akan memiliki kecenderungan untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab dan etis dalam kehidupan sosial maupun profesional.

Dalam konteks kehidupan profesional, nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam keluarga juga berperan dalam membentuk integritas seseorang ketika menjalankan pekerjaannya. Individu yang sejak kecil terbiasa dengan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin cenderung lebih mampu mempertahankan perilaku etis ketika menghadapi berbagai tekanan dalam lingkungan kerja. Sebaliknya, individu yang tidak mendapatkan pembinaan moral yang cukup dalam lingkungan keluarga mungkin lebih rentan terhadap perilaku yang tidak etis, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang mengandung kepentingan pribadi atau keuntungan material.

Selain itu, keluarga juga berperan dalam membentuk sikap terhadap nilai-nilai sosial yang lebih luas, seperti kepedulian terhadap masyarakat dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam banyak kasus, keluarga menjadi tempat pertama di mana individu belajar mengenai pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain serta menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini kemudian menjadi dasar bagi seseorang untuk mengembangkan sikap etis dalam kehidupan sosial maupun dalam menjalankan profesinya.

Dengan demikian, keluarga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pembentukan perilaku etis seseorang. Melalui proses sosialisasi, teladan, pendidikan moral, serta pembentukan karakter yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, individu memperoleh dasar-dasar nilai moral yang akan memengaruhi cara berpikir dan bertindak sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang memiliki integritas moral serta mampu menjalankan tanggung jawab sosial dan profesional secara etis.<sup>66</sup>

### 3. Lingkungan

Selain faktor yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, perilaku etis seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu tersebut hidup dan berinteraksi. Lingkungan dalam konteks ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat secara umum. Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku individu karena melalui lingkungan seseorang berinteraksi dengan berbagai nilai, norma, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Lingkungan sosial merupakan ruang di mana individu belajar mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat, terdapat berbagai norma yang mengatur

---

66 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 52–54.

bagaimana seseorang seharusnya bersikap terhadap orang lain, seperti norma kesopanan, norma hukum, dan norma moral. Melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus, individu akan memahami nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat serta menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma tersebut. Oleh karena itu, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku etis seseorang.<sup>67</sup>

Selain lingkungan sosial, lingkungan pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan perilaku etis. Lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter dan nilai moral. Melalui proses pendidikan, individu diajarkan mengenai pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi perkembangan sikap etis yang akan memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesional.

Lingkungan kerja juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku etis seseorang. Dalam dunia kerja, individu sering dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut pengambilan keputusan yang memiliki dimensi moral. Budaya organisasi, kepemimpinan, serta sistem nilai yang berlaku dalam suatu organisasi dapat memengaruhi cara individu bertindak dalam menghadapi situasi tersebut. Jika suatu organisasi menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, maka anggota organisasi cenderung terdorong untuk bertindak secara etis. Sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap nilai-nilai etika, maka kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak etis dapat meningkat.

Dalam konteks etika profesi, lingkungan organisasi sangat berperan dalam membentuk budaya etika yang mendorong para profesional untuk bertindak sesuai dengan standar moral yang telah ditetapkan.

---

67 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.42–1.43.

Kode etik profesi biasanya disusun untuk menjadi pedoman bagi anggota profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, penerapan kode etik tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi tempat para profesional bekerja. Lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai etika akan membantu individu untuk mempertahankan perilaku etis dalam menjalankan profesinya.<sup>68</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi dan media juga turut memengaruhi lingkungan sosial yang membentuk perilaku etis individu. Informasi yang diperoleh melalui berbagai media dapat memengaruhi cara seseorang memahami nilai-nilai moral dan norma sosial. Oleh karena itu, lingkungan modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi menuntut individu untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring berbagai informasi yang diterima agar tetap dapat mempertahankan nilai-nilai etis dalam kehidupannya.

Lingkungan yang positif biasanya ditandai dengan adanya penghargaan terhadap nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Lingkungan seperti ini dapat mendorong individu untuk mengembangkan perilaku yang etis dan bertanggung jawab. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai moral dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku yang tidak etis, seperti manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun tindakan yang merugikan orang lain.

Dengan demikian, lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pembentukan perilaku etis seseorang. Melalui interaksi dengan berbagai norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat, individu belajar memahami bagaimana seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial dan profesional. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai etika menjadi hal yang sangat penting dalam upaya membangun masyarakat dan dunia profesional yang berintegritas serta bertanggung jawab.<sup>69</sup>

---

68 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 33–35.

69 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 58–60.

#### 4. Masyarakat

Selain faktor yang berasal dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, perilaku etis seseorang juga sangat dipengaruhi oleh masyarakat tempat individu tersebut hidup dan berinteraksi. Masyarakat merupakan ruang sosial yang lebih luas di mana individu belajar memahami norma, nilai, serta aturan yang mengatur kehidupan bersama. Dalam masyarakat, terdapat berbagai sistem nilai yang berkembang dan menjadi pedoman bagi anggotanya dalam menentukan tindakan yang dianggap baik, benar, dan dapat diterima secara sosial.

Masyarakat berperan penting dalam membentuk perilaku etis karena melalui interaksi sosial individu belajar memahami berbagai norma moral yang berlaku. Norma-norma tersebut dapat berupa norma agama, norma kesopanan, norma hukum, maupun nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam masyarakat, individu secara bertahap menginternalisasi nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk standar moral yang digunakan oleh individu dalam menilai suatu tindakan.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat juga berperan sebagai pengawas moral yang secara tidak langsung mengontrol perilaku anggotanya. Melalui berbagai mekanisme sosial seperti penghargaan, sanksi sosial, serta penilaian publik, masyarakat dapat mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya, tindakan yang dianggap jujur dan bertanggung jawab biasanya akan mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari masyarakat, sedangkan tindakan yang melanggar norma sosial dapat menimbulkan kritik atau penolakan dari lingkungan sosial. Mekanisme ini membantu menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Selain itu, masyarakat juga memengaruhi perilaku etis melalui budaya dan tradisi yang berkembang dalam suatu komunitas.

Budaya mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu kelompok masyarakat dan sering kali menjadi dasar dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan yang benar atau salah. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai budaya yang khas, yang memengaruhi cara individu memandang hubungan sosial, tanggung jawab terhadap sesama, serta kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya masyarakat menjadi penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai etika berkembang dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks kehidupan profesional, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan standar etika yang harus dipatuhi oleh para profesional. Setiap profesi pada dasarnya menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sehingga perilaku para profesional sangat dipengaruhi oleh harapan dan tuntutan masyarakat terhadap integritas serta tanggung jawab profesi tersebut. Masyarakat mengharapkan agar para profesional menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

Harapan masyarakat terhadap perilaku etis para profesional sering kali dituangkan dalam bentuk kode etik profesi maupun berbagai regulasi yang mengatur praktik profesional. Dalam bidang pariwisata misalnya, kegiatan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan nilai-nilai etika yang harus diterapkan dalam praktik profesional.<sup>70</sup>

Selain itu, masyarakat modern yang semakin kompleks juga menghadirkan berbagai tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai etika. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial yang cepat dapat memengaruhi cara masyarakat memahami nilai-nilai moral. Dalam situasi seperti ini, individu perlu memiliki

---

70 World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999).

kemampuan untuk menilai secara kritis berbagai pengaruh sosial yang ada agar tetap dapat mempertahankan prinsip-prinsip etika yang mendukung kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

Dengan demikian, masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pembentukan perilaku etis seseorang. Melalui proses sosialisasi, penanaman nilai budaya, serta mekanisme pengawasan sosial, masyarakat membantu membentuk standar moral yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak. Oleh karena itu, terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika sangat penting dalam mendukung perkembangan individu yang memiliki integritas moral serta mampu menjalankan tanggung jawab sosial dan profesional secara etis.

## 5. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pembentukan perilaku etis seseorang. Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut menjadi pedoman bagi anggota masyarakat dalam menentukan tindakan yang dianggap baik, benar, dan pantas dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebudayaan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku etis individu.

Dalam perspektif etika, kebudayaan berfungsi sebagai kerangka nilai yang memberikan arah bagi manusia dalam menjalani kehidupan bersama. Melalui kebudayaan, masyarakat mengembangkan berbagai aturan moral yang mengatur hubungan antarindividu, hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta hubungan manusia dengan sistem sosial yang lebih luas. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan rasa hormat terhadap orang lain sering kali tertanam kuat dalam kebudayaan suatu masyarakat dan menjadi dasar bagi pembentukan perilaku etis. Proses internalisasi nilai-nilai tersebut terjadi melalui berbagai

mekanisme sosial, seperti pendidikan, tradisi keluarga, adat istiadat, serta praktik kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Kebudayaan juga memengaruhi cara individu memahami konsep benar dan salah dalam kehidupan sosial. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai budaya yang berbeda-beda, sehingga standar etika yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Meskipun demikian, pada umumnya terdapat nilai-nilai moral universal yang dihargai oleh berbagai kebudayaan, seperti keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, kebudayaan tidak hanya menjadi sumber pembentukan norma moral, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan keteraturan sosial serta menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama.

Selain itu, kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk identitas moral suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun membantu membentuk karakter individu serta memperkuat rasa tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam banyak masyarakat, tradisi dan adat istiadat sering kali mengandung pesan-pesan moral yang bertujuan untuk mengajarkan generasi muda mengenai pentingnya menjaga keharmonisan sosial, menghormati orang lain, serta bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, kebudayaan berfungsi sebagai sarana pendidikan moral yang tidak formal tetapi sangat efektif dalam membentuk perilaku etis individu.

Dalam konteks kehidupan profesional, kebudayaan juga memengaruhi cara individu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam dunia kerja. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dapat memengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaan, tanggung jawab profesional, serta hubungan dengan rekan kerja maupun masyarakat yang dilayani. Dalam beberapa budaya misalnya, nilai-nilai seperti kerja keras, loyalitas, dan tanggung

---

71 Nurdien H. Kistanto, Ngesti Lestari, dan Slamet Subekti, *Etika Profesi Kearsipan: Modul 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.44

jawab sosial sangat dijunjung tinggi sehingga mendorong individu untuk menjalankan profesinya secara etis dan bertanggung jawab.

Dalam sektor pariwisata, pengaruh kebudayaan terhadap perilaku etis juga menjadi sangat penting. Kegiatan pariwisata tidak hanya melibatkan interaksi antara wisatawan dan pelaku industri pariwisata, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal serta kebudayaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, etika dalam pariwisata menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta perlindungan terhadap warisan budaya masyarakat. Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai pedoman etika pariwisata yang menekankan bahwa kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan menghormati tradisi, identitas budaya, serta nilai-nilai sosial masyarakat setempat.<sup>72</sup>

Perkembangan globalisasi pada masa modern juga membawa pengaruh yang besar terhadap kebudayaan dan nilai-nilai etika dalam masyarakat. Interaksi antarbudaya yang semakin intensif dapat memperkaya pemahaman manusia mengenai berbagai nilai moral yang berkembang di berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat menimbulkan tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi dasar bagi pembentukan perilaku etis masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perkembangan global dan pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas moral mereka.

Dengan demikian, kebudayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam memengaruhi perilaku etis seseorang. Melalui sistem nilai, tradisi, dan norma yang berkembang dalam kebudayaan, individu belajar memahami bagaimana seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial dan profesional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebudayaan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta mampu menghadapi berbagai tantangan moral dalam kehidupan modern.

---

72 World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999)

## 6. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk perilaku etis manusia. Dalam kehidupan manusia, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai pedoman moral yang memberikan arahan mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama, individu memperoleh nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, serta adil dan tidak adil.

Dalam perspektif etika, agama memberikan landasan normatif yang kuat bagi perilaku manusia. Ajaran agama biasanya mengandung berbagai prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi individu dalam mengambil keputusan moral serta dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, agama sering dianggap sebagai salah satu sumber utama dari norma-norma etika yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Pengaruh agama terhadap perilaku etis juga terlihat dalam proses internalisasi nilai moral yang terjadi sejak seseorang masih kecil. Melalui pendidikan agama dalam keluarga, lembaga pendidikan, maupun komunitas keagamaan, individu diajarkan mengenai pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agamanya. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi bagian dari sistem keyakinan yang memengaruhi cara individu berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan demikian, agama berperan sebagai sumber motivasi moral yang mendorong individu untuk bertindak secara benar dan bertanggung jawab.<sup>73</sup>

Selain memberikan pedoman moral bagi individu, agama juga memiliki peran penting dalam membentuk tatanan etika dalam masyarakat. Banyak norma sosial yang berkembang dalam

---

73 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 44–46.

masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Misalnya, nilai-nilai seperti kejujuran dalam berdagang, keadilan dalam hubungan sosial, serta kepedulian terhadap sesama merupakan prinsip-prinsip moral yang sering kali berakar pada ajaran agama. Melalui nilai-nilai tersebut, agama membantu menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang kuat.

Dalam konteks kehidupan profesional, agama juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan etika profesi. Banyak profesi menuntut para anggotanya untuk menjalankan tugas dengan integritas, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran moral yang terdapat dalam berbagai tradisi keagamaan. Oleh karena itu, individu yang memiliki pemahaman dan penghayatan agama yang baik biasanya memiliki dorongan moral yang lebih kuat untuk menjalankan profesinya secara etis dan bertanggung jawab.<sup>74</sup>

Dalam bidang pariwisata, pengaruh agama terhadap perilaku etis juga sangat penting, terutama dalam konteks interaksi antara wisatawan, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal. Kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai pedoman etika pariwisata yang menekankan pentingnya toleransi serta penghormatan terhadap keragaman kepercayaan agama, filosofi, dan moral dalam interaksi antar manusia dan masyarakat. Sikap saling menghormati terhadap keyakinan agama menjadi dasar penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat tuan rumah.

Dalam era globalisasi, interaksi antar manusia yang berasal dari berbagai latar belakang agama semakin intensif. Situasi ini menuntut adanya sikap toleransi, dialog, serta saling menghargai antara pemeluk agama yang berbeda. Etika yang berlandaskan pada nilai-

---

74 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 67–69.

nilai keagamaan dapat menjadi sarana penting untuk membangun kehidupan bersama yang damai dan saling menghormati. Oleh karena itu, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berintegritas. Dengan demikian, agama merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku etis seseorang. Melalui ajaran moral yang terkandung di dalamnya, agama memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan secara bermakna dan bertanggung jawab. Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi individu, tetapi juga berperan dalam membentuk etika sosial dan profesional dalam masyarakat.



# ETIKA PROFESI PARIWISATA



# **ETIKA BISNIS DAN PROFESI:** *Implementasi Standar Etika dalam Berbagai Bidang Bisnis Dan Profesi*

## **BAB III**

### **A. SALES-MARKETING (CONSUMER RIGHTS)**

**D**alam dunia bisnis modern, kegiatan sales dan marketing merupakan bagian yang sangat penting dalam proses distribusi produk dan jasa kepada konsumen. Melalui aktivitas pemasaran, perusahaan berusaha memperkenalkan produk, membangun citra merek, serta mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Namun demikian, aktivitas pemasaran tidak hanya berkaitan dengan strategi penjualan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis. Etika dalam kegiatan sales dan marketing bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara perusahaan dan konsumen berlangsung secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek utama dalam etika pemasaran adalah penghormatan terhadap hak-hak konsumen (*consumer rights*). Konsumen sebagai pengguna akhir dari suatu produk atau jasa memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam praktik bisnis



<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/pasar-persaingan-sempurna>

yang etis, perusahaan tidak boleh melakukan manipulasi informasi, memberikan janji yang berlebihan, atau menyembunyikan fakta penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Kejujuran dalam komunikasi pemasaran merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku bisnis.

Hak konsumen juga mencakup hak untuk memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah dijanjikan. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, maupun kepentingan konsumen. Praktik pemasaran yang etis tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab produsen terhadap konsumen menjadi bagian penting dari penerapan etika dalam bisnis modern.<sup>75</sup>

Selain itu, etika dalam kegiatan sales dan marketing juga menekankan pentingnya keadilan dalam persaingan usaha. Perusahaan harus menjalankan strategi pemasaran secara profesional tanpa merugikan pihak lain melalui praktik yang tidak etis, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan mengenai pesaing, manipulasi harga, atau praktik promosi yang tidak transparan. Persaingan yang sehat dalam dunia bisnis justru dapat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen.

Dalam praktik pemasaran yang beretika, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Aktivitas promosi dan pemasaran tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap nilai-nilai sosial, budaya, maupun moral dalam masyarakat. Misalnya, penggunaan iklan yang menyesatkan, eksploitasi kelompok rentan, atau penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dapat merusak kepercayaan publik terhadap dunia bisnis. Oleh karena itu, etika pemasaran menuntut para pelaku

---

75 K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000)*, 102–104.

bisnis untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap strategi komunikasi dan promosi yang dilakukan.

Prinsip-prinsip etika juga berlaku dalam berbagai sektor bisnis, termasuk sektor pariwisata. Dalam industri pariwisata, kegiatan pemasaran harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab dengan memberikan informasi yang akurat mengenai destinasi wisata, fasilitas, serta layanan yang ditawarkan kepada wisatawan. Informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak boleh menyesatkan atau memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan serta menciptakan hubungan yang saling menghormati antara pelaku industri pariwisata dan konsumen.<sup>76</sup>

Selain itu, etika pemasaran juga menuntut adanya transparansi dalam transaksi bisnis. Konsumen berhak mengetahui harga yang sebenarnya, syarat dan ketentuan layanan, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembelian produk atau jasa. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumen serta mencegah terjadinya konflik atau ketidakpuasan di kemudian hari. Dalam jangka panjang, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pemasaran cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.

Dengan demikian, penerapan etika dalam kegiatan sales dan marketing tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen moral perusahaan terhadap konsumen dan masyarakat. Penghormatan terhadap hak-hak konsumen, kejujuran dalam komunikasi pemasaran, serta tanggung jawab sosial dalam kegiatan bisnis merupakan prinsip-prinsip penting yang harus dijalankan oleh setiap pelaku usaha. Melalui penerapan etika pemasaran yang baik, dunia bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

---

<sup>76</sup> World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999), Pasal 1.

## B. FINANCE (CORRUPTION, FRAUD)

Bidang keuangan (finance) merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam dunia bisnis dan profesi. Aktivitas keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan dana, investasi, pelaporan keuangan, perencanaan anggaran, hingga pengawasan terhadap arus kas organisasi.

Karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya ekonomi, bidang keuangan menuntut tingkat integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Tanpa penerapan prinsip etika yang kuat, sektor keuangan sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan seperti korupsi, penipuan (fraud), manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan kekuasaan.



<https://iblam.ac.id/2025/08/12/pahami-pengertian-korupsi-dan-tindakan-korupsi/>

Salah satu masalah etika yang paling serius dalam bidang keuangan adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Praktik korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dana, maupun penyalahgunaan anggaran. Dalam dunia bisnis dan organisasi, korupsi tidak hanya merugikan perusahaan atau lembaga secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta melemahkan sistem tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penerapan etika dalam bidang keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serta menjaga integritas lembaga atau organisasi.<sup>77</sup>

Selain korupsi, fraud atau penipuan juga merupakan masalah etika yang sering terjadi dalam bidang keuangan. Fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak

77 K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000)*, 115–117.

jujur atau melanggar hukum. Bentuk fraud dalam bidang keuangan dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, pemalsuan dokumen keuangan, maupun praktik insider trading dalam pasar modal. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang menuntut adanya kejujuran, akuntabilitas, serta tanggung jawab profesional.

Dalam konteks etika profesi, para profesional di bidang keuangan seperti akuntan, auditor, analis keuangan, maupun manajer keuangan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya secara objektif, independen, dan transparan. Profesional keuangan harus memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan bersifat akurat dan dapat dipercaya. Kejujuran dalam pelaporan keuangan sangat penting karena informasi tersebut menjadi dasar bagi berbagai keputusan ekonomi, seperti investasi, pengelolaan perusahaan, maupun kebijakan publik. Oleh karena itu, integritas profesional merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam bidang keuangan.<sup>78</sup>

Penerapan etika dalam bidang keuangan juga berkaitan erat dengan konsep good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dalam pengelolaan organisasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang serta menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap aktivitas keuangan. Dalam praktiknya, penerapan standar etika dalam bidang keuangan sering diwujudkan melalui penyusunan kode etik profesi, sistem audit yang independen, serta mekanisme pengendalian internal yang kuat.

Dalam sektor pariwisata maupun sektor bisnis lainnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Industri pariwisata melibatkan

---

78 Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases* (New Jersey: Pearson Education, 2012), 364–366.

berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, investor, serta masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dalam sektor ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan sumber daya ekonomi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata serta mencegah praktik-praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat.<sup>79</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi digital dalam bidang keuangan juga membawa tantangan baru bagi penerapan etika profesi. Sistem keuangan digital, transaksi elektronik, serta penggunaan teknologi finansial (fintech) memerlukan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data, pencucian uang, maupun berbagai bentuk penipuan digital. Oleh karena itu, para profesional di bidang keuangan dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Dengan demikian, penerapan etika dalam bidang keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dunia bisnis dan profesi. Pencegahan terhadap praktik korupsi dan fraud hanya dapat dilakukan melalui komitmen terhadap nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta akuntabilitas. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, sektor keuangan dapat berfungsi secara sehat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

### **C. IT (AI, PRIVACY, CREATIVITY INFRINGEMENTS/COPY RIGHTS ISSUES)**

Perkembangan teknologi informasi (Information Technology/IT) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis dan profesi. Teknologi digital memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Namun di balik berbagai manfaat tersebut,

---

79 World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999).

perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan berbagai tantangan etika yang berkaitan dengan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan etika dalam bidang teknologi informasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif.



<https://ubharajaya.ac.id/mengupas-pentingnya-perlindungan-data-pribadi-di-era-digital-lewat-jurnal-dosen-ubhara-jaya/>

Salah satu isu etika yang semakin mendapat perhatian dalam bidang teknologi informasi adalah penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Teknologi AI memungkinkan sistem komputer untuk melakukan berbagai tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti analisis data, pengambilan keputusan, hingga pembuatan konten digital. Meskipun teknologi ini menawarkan banyak peluang dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, penggunaannya juga menimbulkan berbagai pertanyaan etis. Misalnya, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan otomatis dapat menimbulkan masalah terkait transparansi, akuntabilitas, serta kemungkinan terjadinya bias dalam sistem algoritma. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan teknologi AI perlu memperhatikan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>80</sup>

Selain isu terkait kecerdasan buatan, perlindungan privasi (*privacy*) juga merupakan aspek penting dalam etika teknologi informasi. Dalam era digital, berbagai aktivitas manusia seperti komunikasi, transaksi ekonomi, serta interaksi sosial sering kali melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi.

80 Luciano Floridi et al., "AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society," *Minds and Machines* 28, no. 4 (2018): 689–707.

Perusahaan teknologi, lembaga keuangan, maupun organisasi lainnya memiliki akses terhadap berbagai jenis data yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, pengelolaan data tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Pelanggaran terhadap privasi individu, seperti penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran informasi rahasia, dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks etika profesi, para profesional di bidang teknologi informasi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan data serta menghormati hak privasi pengguna.<sup>81</sup>

Isu etika lain yang sering muncul dalam bidang teknologi informasi berkaitan dengan pelanggaran terhadap kreativitas dan hak cipta (copyright). Kemajuan teknologi digital memudahkan proses reproduksi dan distribusi berbagai karya intelektual seperti tulisan, musik, film, perangkat lunak, maupun karya seni lainnya. Meskipun kemudahan ini memberikan peluang bagi penyebaran pengetahuan dan kreativitas, hal tersebut juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tindakan seperti pembajakan perangkat lunak, penggunaan karya tanpa izin, serta plagiarisme merupakan contoh pelanggaran etika yang sering terjadi dalam dunia digital. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak cipta menjadi prinsip penting dalam etika teknologi informasi, karena hak tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kreativitas dan kerja keras para pencipta karya.

Dalam konteks bisnis dan profesi, penerapan etika dalam bidang teknologi informasi juga berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam menggunakan teknologi secara bijaksana. Organisasi harus memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari penggunaannya. Misalnya, perusahaan teknologi perlu mengembangkan sistem keamanan digital yang kuat untuk melindungi data pengguna serta memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat.

---

81 K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000)*, 124–126.

Dalam sektor pariwisata dan industri lainnya, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam penyediaan layanan kepada konsumen. Sistem reservasi daring, platform perjalanan digital, serta layanan informasi wisata berbasis internet mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Namun demikian, penggunaan teknologi ini juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika, seperti transparansi informasi, perlindungan data pengguna, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual yang terkait dengan konten digital yang digunakan dalam promosi pariwisata.

Dengan demikian, etika teknologi informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, perlindungan privasi, serta penghormatan terhadap hak cipta merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Melalui penerapan etika yang baik, perkembangan teknologi tidak hanya dapat mendorong kemajuan ekonomi dan inovasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap dunia bisnis dan profesi.

#### D. **GOVERNMENT (CORRUPTION, CUSTOMER SERVICE)**

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan. Pemerintah berfungsi sebagai lembaga yang menyusun kebijakan publik, menyediakan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penerapan etika dalam pemerintahan (*government ethics*) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh



<https://beritaborneo.com/main/kpk-serbu-kalbar-3-tersangka-tumbang/>

pejabat publik digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar dalam etika pemerintahan adalah praktik korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Praktik korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dana publik, manipulasi anggaran, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari penerapan etika dalam sektor pemerintahan.

Dalam perspektif etika profesi, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pada dasarnya merupakan amanah dari masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah harus didasarkan pada prinsip keadilan serta mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Etika pemerintahan menuntut agar para pejabat publik menghindari konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan jabatan, serta selalu bertindak secara transparan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Selain masalah korupsi, aspek lain yang sangat penting dalam etika pemerintahan adalah pelayanan publik (*customer service*). Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan serta hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, etika pelayanan publik menuntut para aparatur pemerintah untuk bersikap profesional, ramah, jujur, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang beretika juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi pemerintahan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, termasuk prosedur, biaya, serta waktu penyelesaian layanan tersebut. Transparansi ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun diskriminasi dalam pelayanan publik. Dengan adanya sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin meningkat.

Dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor pariwisata, peran pemerintah juga sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mendukung perkembangan sektor pariwisata sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal, lingkungan, serta warisan budaya. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pariwisata juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang menekankan tanggung jawab sosial, transparansi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat.<sup>82</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem administrasi digital atau e-government. Penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Namun demikian, penerapan teknologi dalam pemerintahan juga harus memperhatikan aspek etika, seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, penerapan etika dalam sektor pemerintahan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip

---

82 *World Tourism Organization, Global Code of Ethics for Tourism (Madrid: UNWTO, 1999).*

seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Melalui penerapan etika yang kuat, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.<sup>83</sup>

## E. MEDICINE (HUMAN RIGHTS)

Bidang medis merupakan salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar karena berkaitan langsung dengan kehidupan, kesehatan, dan keselamatan manusia. Profesi di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, tenaga medis, serta tenaga kesehatan lainnya dituntut untuk menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan kompetensi ilmiah dan teknis, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat. Oleh karena itu, etika medis menjadi bagian penting dalam praktik pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan menghormati martabat dan hak-hak pasien sebagai manusia.



<https://minews.id/cuitan-mi/peningkatan-kualitas-pendidikan-dan-layanan-kesehatan-wujud-komitmen-kesejahteraan-masyarakat-papua>

Dalam etika medis, salah satu prinsip yang sangat mendasar adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Setiap individu memiliki hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat tanpa diskriminasi. Hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan, hak untuk menentukan pilihan dalam proses pengobatan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh

83 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 74–76.

karena itu, para profesional di bidang medis memiliki kewajiban moral untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien dalam setiap tindakan medis yang dilakukan.

Salah satu prinsip penting dalam etika medis adalah prinsip otonomi pasien (*patient autonomy*). Prinsip ini menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk menentukan keputusan mengenai perawatan medis yang akan diterimanya. Dalam praktiknya, tenaga medis harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai diagnosis, pilihan pengobatan, risiko yang mungkin terjadi, serta manfaat dari tindakan medis yang diusulkan. Melalui proses yang dikenal sebagai *informed consent*, pasien diberikan kesempatan untuk memahami kondisi kesehatannya serta mengambil keputusan secara sadar mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Prinsip ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian integral dari etika dalam praktik kedokteran.<sup>84</sup>

Selain prinsip otonomi, etika medis juga menekankan prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*, yaitu kewajiban tenaga medis untuk memberikan manfaat bagi pasien serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya. Prinsip *beneficence* mengharuskan tenaga kesehatan untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi pasien, sedangkan prinsip *non-maleficence* menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan yang tidak perlu. Dalam praktiknya, kedua prinsip ini menjadi dasar bagi tenaga medis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan diagnosis, pengobatan, maupun tindakan medis lainnya.

Etika medis juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan (*justice*) dalam pelayanan kesehatan. Prinsip ini menuntut agar pelayanan kesehatan diberikan secara adil dan merata kepada semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, maupun status lainnya. Setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks ini,

---

84 Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics* (New York: Oxford University Press, 2013), 101–105.

pemerintah dan lembaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara adil dan tidak diskriminatif.<sup>85</sup>

Dalam perkembangan dunia modern, berbagai kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan juga menimbulkan berbagai dilema etika baru. Misalnya, penggunaan teknologi biomedis seperti rekayasa genetika, transplantasi organ, serta penelitian medis terhadap manusia menimbulkan berbagai pertanyaan etika yang berkaitan dengan hak asasi manusia, martabat manusia, serta batas-batas intervensi medis terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, penerapan etika dalam bidang medis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks global, berbagai organisasi internasional juga menekankan pentingnya penerapan etika dalam praktik pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip etika medis tidak hanya bertujuan untuk melindungi pasien, tetapi juga untuk menjaga integritas profesi medis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Tenaga medis sebagai profesional di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, empati, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, etika medis merupakan bagian penting dalam praktik profesional di bidang kesehatan. Penerapan prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, otonomi pasien, keadilan dalam pelayanan kesehatan, serta tanggung jawab moral tenaga medis menjadi dasar bagi terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat. Melalui penerapan etika yang baik, profesi medis dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya efektif secara medis, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bersama.

---

85 K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000)*, 135–137.

## F. TOURISM (*GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM/GCET*)

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat dan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. Pariwisata tidak hanya melibatkan aktivitas perjalanan dan rekreasi, tetapi juga melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah, serta berbagai



<https://investor.id/business/394700/pariwisata-berkelanjutan-terus-tumbuh>

pelaku usaha di bidang jasa. Karena melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang luas, maka kegiatan pariwisata perlu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang jelas dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penerapan etika pariwisata menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak serta tidak merusak nilai-nilai sosial dan lingkungan.

Salah satu pedoman internasional yang menjadi dasar penerapan etika dalam industri pariwisata adalah *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET) yang disusun oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO). Kode etik ini bertujuan untuk memberikan kerangka moral bagi para pelaku pariwisata, termasuk pemerintah, pelaku industri, wisatawan, serta masyarakat lokal, agar kegiatan pariwisata dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. GCET menekankan bahwa pariwisata harus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus menghormati nilai-nilai budaya, hak asasi manusia, serta kelestarian lingkungan.<sup>86</sup>

Salah satu prinsip penting dalam *Global Code of Ethics for Tourism* adalah bahwa pariwisata harus mendorong saling pengertian dan saling menghormati antar manusia dan masyarakat. Pariwisata memungkinkan terjadinya pertemuan antara individu yang berasal

<sup>86</sup> World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism* (Madrid: UNWTO, 1999).

dari latar belakang budaya, agama, dan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan pariwisata harus didasarkan pada sikap toleransi, penghormatan terhadap keragaman budaya, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat. Para pelaku industri pariwisata maupun wisatawan memiliki tanggung jawab untuk menghormati tradisi, nilai-nilai sosial, serta praktik budaya masyarakat yang menjadi tujuan wisata.<sup>87</sup>

Selain itu, etika pariwisata juga menekankan pentingnya kontribusi pariwisata terhadap pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pariwisata harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak merusak lingkungan alam maupun warisan budaya yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi wisata. Pelaku industri pariwisata memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta menjaga kelestarian ekosistem yang ada. Prinsip ini sangat penting karena keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Selain aspek lingkungan, GCET juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kegiatan pariwisata seharusnya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata. Hal ini dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi pelaku usaha besar, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dalam konteks etika profesi, para pelaku industri pariwisata seperti agen perjalanan, pengelola hotel, pemandu wisata, serta penyedia jasa transportasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang jujur, transparan, dan profesional kepada wisatawan. Informasi mengenai destinasi wisata, fasilitas, maupun harga layanan harus disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan. Praktik

---

<sup>87</sup> World Tourism Organization, *Global Code of Ethics for Tourism*, Pasal 1.

pemasaran yang jujur serta pelayanan yang berkualitas merupakan bagian penting dari penerapan etika dalam industri pariwisata.

Selain itu, wisatawan juga memiliki tanggung jawab moral dalam kegiatan pariwisata. Wisatawan diharapkan untuk menghormati budaya lokal, menjaga kebersihan lingkungan, serta mematuhi aturan yang berlaku di tempat yang dikunjungi. Sikap wisatawan yang bertanggung jawab dapat membantu menjaga hubungan yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal serta mendukung keberlanjutan industri pariwisata.

Dengan demikian, penerapan *Global Code of Ethics for Tourism* menjadi landasan penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Melalui penerapan etika yang baik, sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.



# ETIKA PROFESI PARIWISATA



# KODE ETIK PARIWISATA GLOBAL

## BAB IV

### A. PENERAPAN GCET DALAM INDUSTRI PARIWISATA (CONTOH/ STUDI KASUS)

Kode Etik Pariwisata Global atau *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET) merupakan seperangkat prinsip moral yang dirumuskan untuk menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Kode etik ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata, tetapi juga bagi wisatawan serta masyarakat lokal yang menjadi bagian dari sistem pariwisata. Tujuan utama dari GCET adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penerapan GCET dalam industri pariwisata dapat dilihat melalui berbagai kebijakan, program, serta praktik bisnis yang mendukung pembangunan pariwisata yang etis dan berkelanjutan.

Salah satu contoh penerapan GCET dapat dilihat dalam upaya menghormati budaya dan tradisi masyarakat lokal di berbagai destinasi wisata. Dalam kode etik tersebut ditegaskan bahwa kegiatan pariwisata harus dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai sosial,



<https://www.okocenews.com/peluang-pasar/42011750065/peningkatan-wisatawan-mancanegara-berdampak-positif-bagi-umkm-di-destinasi-wisata>

budaya, serta tradisi masyarakat di negara atau daerah tujuan wisata. Hal ini berarti bahwa para pelaku industri pariwisata harus memastikan bahwa kegiatan wisata tidak merusak identitas budaya masyarakat setempat, tetapi justru membantu melestarikan dan mempromosikan warisan budaya tersebut. Misalnya, dalam pengelolaan destinasi wisata budaya, pelaku usaha pariwisata sering melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, pengrajin, atau pelaku seni budaya sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>88</sup>

Contoh lain dari penerapan GCET adalah dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Banyak destinasi wisata saat ini menerapkan konsep *sustainable tourism* dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan alam. Misalnya, pengelola taman nasional atau kawasan wisata alam sering menerapkan kebijakan pembatasan jumlah pengunjung, pengelolaan sampah yang ketat, serta program edukasi lingkungan bagi wisatawan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memastikan bahwa sumber daya alam yang menjadi daya tarik wisata tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Selain itu, penerapan GCET juga dapat dilihat dalam perlindungan hak-hak pekerja di sektor pariwisata. Industri pariwisata merupakan sektor yang melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari pekerja hotel, pemandu wisata, sopir transportasi wisata, hingga pelaku usaha kecil di sekitar destinasi wisata. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk memastikan bahwa para pekerja di sektor pariwisata mendapatkan perlakuan yang adil, kondisi kerja yang layak, serta kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan mereka. Prinsip ini sejalan dengan GCET yang menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.<sup>89</sup>

---

88 *World Tourism Organization, Global Code of Ethics for Tourism (Madrid: UNWTO, 1999), Pasal 1.*

89 *World Tourism Organization, Global Code of Ethics for Tourism, Pasal 5*

Dalam praktik nyata, berbagai negara telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCET dalam kebijakan pengembangan pariwisata nasional mereka. Misalnya, beberapa destinasi wisata mengembangkan program *community-based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat. Dalam model ini, masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga mereka dapat berperan sebagai pelaku utama dalam kegiatan pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tetapi juga mendorong pelestarian budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata tersebut.

Selain itu, penerapan GCET juga dapat dilihat dalam praktik etika pemasaran pariwisata. Informasi yang disampaikan kepada wisatawan mengenai destinasi wisata, fasilitas, maupun layanan harus bersifat jujur dan tidak menyesatkan. Promosi pariwisata harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya sehingga wisatawan dapat memiliki harapan yang realistis terhadap pengalaman wisata yang akan mereka peroleh. Prinsip kejujuran dalam komunikasi pemasaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan serta menciptakan hubungan yang baik antara pelaku industri pariwisata dan konsumen.

Sebagai contoh studi kasus, beberapa destinasi wisata dunia telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip GCET dalam pengelolaan pariwisata mereka. Destinasi yang menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan biasanya mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengembangan transportasi ramah lingkungan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan destinasi wisata.

Dengan demikian, penerapan *Global Code of Ethics for Tourism* dalam industri pariwisata merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata berkembang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCET menekankan pentingnya keseimbangan

antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap budaya dan hak-hak masyarakat lokal. Melalui implementasi kode etik ini, industri pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata.<sup>90</sup>

---

90 David A. Fennell, *Tourism Ethics* (Bristol: Channel View Publications, 2006), 78–82.

# FAKTOR-FAKTOR KONTRIBUTOR TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN ETIKA

## BAB V

### A. FAKTOR INTERNAL

#### 1. Internal individu

Pelanggaran etika dalam dunia bisnis dan profesi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor internal individu, yaitu berbagai kondisi psikologis, moral, dan karakter pribadi seseorang yang memengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, serta bertindak dalam situasi tertentu. Faktor ini menjadi dasar utama yang menentukan apakah seseorang akan bertindak secara etis atau justru melakukan pelanggaran terhadap norma dan nilai moral yang berlaku.

Faktor internal individu berkaitan erat dengan integritas moral yang dimiliki seseorang. Integritas moral merupakan keselarasan antara nilai, prinsip, dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki integritas tinggi cenderung mempertahankan prinsip moralnya meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis.



<https://stekom.ac.id/artikel/penyebab-dan-cara-mengatasi-budaya-korupsi>

Sebaliknya, individu yang memiliki integritas moral yang lemah lebih mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi, tekanan lingkungan, maupun keuntungan jangka pendek yang dapat diperoleh melalui tindakan yang melanggar etika. Dalam konteks dunia profesi, integritas menjadi salah satu kualitas yang sangat penting karena profesi pada umumnya menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.<sup>91</sup>

Selain integritas, tingkat kesadaran moral (*moral awareness*) juga merupakan bagian penting dari faktor internal individu yang memengaruhi perilaku etis. Kesadaran moral merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengenali bahwa suatu situasi mengandung dimensi etis yang memerlukan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan. Tidak semua individu memiliki tingkat kesadaran moral yang sama. Ada individu yang mampu dengan cepat memahami bahwa suatu tindakan berpotensi merugikan orang lain atau melanggar norma yang berlaku, sementara individu lain mungkin tidak menyadari implikasi etis dari tindakannya. Dalam praktiknya, rendahnya kesadaran moral sering menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran etika tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, organisasi, maupun profesi yang dijalankannya.

Faktor lain yang termasuk dalam aspek internal individu adalah nilai-nilai pribadi (*personal values*) yang terbentuk melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak. Nilai-nilai tersebut biasanya dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, agama, serta pengalaman hidup seseorang. Nilai-nilai pribadi ini akan menjadi pedoman dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Dalam dunia kerja, individu yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat biasanya akan berusaha mempertahankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, individu yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum cenderung lebih rentan melakukan tindakan yang tidak etis, seperti manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik korupsi.

---

91 K. Bertens, *Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)*, 45–47.

Selain itu, motivasi pribadi juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika. Dalam beberapa kasus, individu dapat terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak etis karena keinginan untuk memperoleh keuntungan materi, kekuasaan, atau pengakuan sosial secara cepat. Tekanan untuk mencapai target tertentu dalam organisasi juga dapat memperkuat motivasi tersebut. Apabila individu tidak memiliki landasan moral yang kuat, maka motivasi yang berorientasi pada keuntungan pribadi dapat mendorong seseorang untuk mengabaikan norma etika demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Faktor internal individu juga berkaitan dengan kemampuan pengendalian diri (*self-control*). Pengendalian diri merupakan kemampuan seseorang untuk menahan dorongan atau keinginan yang dapat mengarah pada tindakan yang tidak etis. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin dihadapkan pada peluang untuk melakukan pelanggaran etika, misalnya memanfaatkan posisi jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Individu yang memiliki pengendalian diri yang baik akan mampu menolak godaan tersebut dan tetap berpegang pada prinsip etika yang diyakininya. Sebaliknya, individu yang memiliki pengendalian diri yang rendah lebih mudah terjerumus pada perilaku yang melanggar norma moral dan profesional.<sup>92</sup>

Dalam konteks profesional, faktor internal individu sering kali menjadi titik awal munculnya berbagai bentuk pelanggaran etika, seperti penipuan (*fraud*), manipulasi laporan, penyalahgunaan jabatan, maupun praktik korupsi. Oleh karena itu, pengembangan karakter dan integritas pribadi menjadi sangat penting dalam membangun budaya etika di lingkungan kerja. Organisasi tidak hanya perlu menetapkan kode etik dan aturan formal, tetapi juga harus mendorong pembentukan kesadaran moral serta tanggung jawab pribadi di antara para anggotanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor internal individu memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan apakah

---

92 Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases* (Boston: Pearson Education, 2012), 68–70.

seseorang akan bertindak secara etis atau tidak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Integritas moral, kesadaran etis, nilai-nilai pribadi, motivasi, serta kemampuan pengendalian diri merupakan unsur-unsur penting yang membentuk perilaku etis individu. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah pelanggaran etika tidak hanya dilakukan melalui regulasi dan pengawasan eksternal, tetapi juga melalui pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai moral dalam diri setiap individu yang terlibat dalam dunia bisnis dan profesi.

## 2. Internal perusahaan/ organisasi

Selain faktor yang berasal dari dalam diri individu, pelanggaran etika dalam dunia bisnis dan profesi juga sering dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari perusahaan atau organisasi tempat seseorang bekerja. Lingkungan organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku etis maupun tidak etis dari para anggotanya. Struktur organisasi, budaya kerja, sistem pengawasan, serta kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dapat mendorong munculnya perilaku yang sesuai dengan standar etika atau justru sebaliknya menjadi pemicu terjadinya pelanggaran etika.

Salah satu faktor penting dalam organisasi yang dapat memengaruhi perilaku etis adalah budaya organisasi (*organizational culture*). Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu perusahaan. Apabila suatu organisasi memiliki budaya yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial, maka para anggota organisasi akan terdorong untuk bertindak secara etis dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, apabila budaya organisasi lebih menekankan pada pencapaian keuntungan semata tanpa memperhatikan cara mencapainya, maka kondisi tersebut dapat menciptakan tekanan bagi karyawan untuk melakukan berbagai tindakan yang melanggar etika demi mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, budaya organisasi yang tidak sehat bahkan dapat menormalisasi

praktik-praktik tidak etis seperti manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi.

Faktor lain yang juga berperan penting adalah kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk iklim etika dalam suatu perusahaan. Pemimpin yang memberikan teladan dalam menjalankan nilai-nilai etika akan mendorong



<https://www.bola.com/ragam/read/5618781/8-con-toh-perilaku-kepemimpinan-yang-menginspirasi-tim>

anggota organisasi untuk mengikuti perilaku yang sama. Sebaliknya, apabila pemimpin justru terlibat dalam tindakan yang tidak etis atau membiarkan praktik-praktik tersebut terjadi, maka hal itu dapat memberikan pesan bahwa pelanggaran etika merupakan sesuatu yang dapat diterima dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berintegritas sangat diperlukan untuk membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme.<sup>93</sup>

Selain budaya organisasi dan kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan juga merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika. Organisasi yang memiliki sistem pengawasan yang lemah cenderung lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana, penipuan (*fraud*), maupun praktik korupsi. Sebaliknya, organisasi yang menerapkan sistem pengendalian internal yang baik biasanya memiliki prosedur yang jelas dalam pengelolaan keuangan, mekanisme audit yang transparan, serta sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran etika tanpa takut mengalami tekanan atau diskriminasi. Sistem pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak etis sejak awal.

93 Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases* (Boston: Pearson Education, 2012), 101–103.

Faktor berikutnya adalah kebijakan dan sistem penghargaan dalam organisasi. Dalam banyak perusahaan, sistem penilaian kinerja sering kali berfokus pada pencapaian target tertentu, seperti peningkatan penjualan atau keuntungan perusahaan. Apabila sistem penghargaan hanya menekankan hasil tanpa memperhatikan proses, maka karyawan dapat terdorong untuk menggunakan berbagai cara yang tidak etis demi mencapai target tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menerapkan sistem penilaian kinerja yang tidak hanya mempertimbangkan hasil kerja, tetapi juga cara atau proses yang digunakan dalam mencapainya. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa keberhasilan organisasi dicapai melalui praktik-praktik yang sesuai dengan standar etika dan profesionalisme.

Selain itu, kurangnya penerapan kode etik dan pelatihan etika dalam organisasi juga dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika. Banyak organisasi telah memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya, tetapi dalam praktiknya kode etik tersebut sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak diimplementasikan secara efektif. Tanpa adanya sosialisasi, pelatihan, serta komitmen dari seluruh anggota organisasi, kode etik tidak akan mampu berfungsi secara optimal dalam mengarahkan perilaku karyawan. Oleh karena itu, organisasi perlu secara aktif memberikan pendidikan dan pelatihan etika kepada para anggotanya agar mereka memahami pentingnya nilai-nilai etika dalam menjalankan aktivitas profesional.

Dalam konteks dunia bisnis modern, berbagai skandal korporasi yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa pelanggaran etika sering kali tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh kegagalan sistem dalam organisasi. Ketika organisasi tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai, budaya kerja yang sehat, serta kepemimpinan yang berintegritas, maka risiko terjadinya pelanggaran etika akan semakin besar. Oleh karena itu, upaya pencegahan pelanggaran etika harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan faktor-faktor internal organisasi yang dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor internal perusahaan atau organisasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap terjadinya pelanggaran etika dalam dunia bisnis dan profesi. Budaya organisasi, kepemimpinan, sistem pengendalian internal, kebijakan penghargaan, serta penerapan kode etik merupakan beberapa faktor penting yang menentukan apakah suatu organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang etis. Melalui pengelolaan organisasi yang baik dan berintegritas, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran etika serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia bisnis dan profesi.

#### **B. FAKTOR EXTERNAL (*GENERAL BUSINESS ENVIRONMENT/GBE*): FAKTOR POLITIK, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, TEKNOLOGI, ENVIRONMENT/LINGKUNGAN ALAM, LEGAL (PESTEL)**

Selain faktor internal yang berasal dari individu maupun organisasi, pelanggaran etika dalam dunia bisnis dan profesi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di luar organisasi. Lingkungan eksternal ini sering disebut sebagai *General Business Environment* (GBE), yaitu kondisi umum yang memengaruhi aktivitas bisnis dan profesional dalam suatu masyarakat. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk menganalisis faktor eksternal tersebut adalah model PESTEL, yang mencakup faktor politik (political), ekonomi (economic), sosial-budaya (socio-cultural), teknologi (technological), lingkungan alam (environmental), serta aspek hukum (legal). Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi cara organisasi dan individu mengambil keputusan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap standar etika.

Pertama, faktor politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku etis dalam dunia bisnis dan profesi. Stabilitas politik, kebijakan pemerintah, serta kualitas tata kelola pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik bisnis yang transparan dan berintegritas. Sebaliknya, dalam sistem politik yang lemah atau koruptif, pelanggaran etika sering kali menjadi lebih mudah

terjadi karena adanya praktik kolusi, nepotisme, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi politik yang tidak stabil juga dapat menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk melakukan berbagai cara demi mempertahankan kelangsungan usaha, bahkan jika cara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis.



[https://www.researchgate.net/figure/PESTEL-analysis-Source-the-authors\\_fig2\\_373122171](https://www.researchgate.net/figure/PESTEL-analysis-Source-the-authors_fig2_373122171)

Kedua, faktor ekonomi juga berperan penting dalam memengaruhi perilaku etis. Situasi ekonomi yang sulit, seperti krisis ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, atau persaingan bisnis yang sangat ketat, dapat mendorong individu maupun organisasi untuk mengambil keputusan yang tidak etis demi mempertahankan keuntungan atau kelangsungan usaha. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, beberapa perusahaan mungkin tergoda untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, mengurangi kualitas produk, atau mengeksploitasi tenaga kerja untuk menekan biaya produksi. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang stabil dan sistem ekonomi yang adil dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi praktik bisnis yang etis.<sup>94</sup>

Ketiga, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi cara masyarakat memandang dan menilai perilaku etis. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, serta tradisi yang berbeda dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah. Dalam beberapa budaya, misalnya, praktik pemberian hadiah kepada pejabat atau mitra bisnis dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan, tetapi dalam konteks lain praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk

<sup>94</sup> Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases* (Boston: Pearson Education, 2012), 54–56.

suap. Perbedaan nilai budaya ini dapat menimbulkan dilema etika bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara atau wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan profesi perlu memahami konteks sosial dan budaya tempat mereka beroperasi agar dapat mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai masyarakat setempat.

Keempat, faktor teknologi juga memiliki pengaruh yang semakin besar dalam perkembangan dunia bisnis modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemudahan dalam aktivitas bisnis, tetapi sekaligus juga membuka peluang baru bagi terjadinya pelanggaran etika. Misalnya, penggunaan teknologi digital dapat mempermudah terjadinya pencurian data, pelanggaran privasi, penyebaran informasi yang menyesatkan, maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan kebijakan etika yang jelas terkait penggunaan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta penghormatan terhadap hak cipta dan kreativitas intelektual.

Kelima, faktor lingkungan alam (*environmental factors*) juga semakin mendapat perhatian dalam pembahasan etika bisnis dan profesi. Aktivitas bisnis yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan (*sustainable*), dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika lingkungan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan serta menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.<sup>95</sup>

---

95 K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000)*, 112–115.

Keenam, faktor hukum (legal factors) juga merupakan unsur penting dalam membentuk perilaku etis dalam dunia bisnis dan profesi. Sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika. Peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai praktik bisnis, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, serta pencegahan korupsi dapat memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab. Sebaliknya, apabila sistem hukum lemah atau penegakan hukum tidak konsisten, maka pelanggaran etika dapat terjadi dengan lebih mudah karena pelaku tidak merasa takut terhadap sanksi yang mungkin diberikan.

Dengan demikian, faktor eksternal yang dianalisis melalui pendekatan PESTEL menunjukkan bahwa perilaku etis dalam dunia bisnis dan profesi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu atau organisasi, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang lebih luas. Faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan alam, dan hukum membentuk konteks yang memengaruhi bagaimana individu dan organisasi mengambil keputusan etis dalam praktik profesional mereka. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah pelanggaran etika harus mempertimbangkan tidak hanya aspek internal organisasi, tetapi juga dinamika lingkungan eksternal yang terus berkembang dalam masyarakat global.

### **C. MINI CASE STUDY: IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN ETIKA PADA KASUS- KASUS YANG DIBERIKAN**

Dalam kajian etika bisnis dan profesi, pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teoritis, tetapi juga melalui analisis kasus nyata (*case study*). Metode studi kasus memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pelanggaran etika dapat terjadi dalam praktik dunia kerja, sekaligus membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya

penyimpangan tersebut. Melalui pendekatan ini, mahasiswa maupun praktisi dapat memahami secara lebih mendalam dinamika yang terjadi dalam organisasi serta berbagai kondisi yang dapat mendorong seseorang atau suatu institusi melakukan tindakan yang tidak etis.

Salah satu contoh kasus yang sering dijadikan bahan kajian dalam etika bisnis adalah kasus manipulasi laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Dalam kasus seperti ini, manajemen perusahaan sengaja mengubah atau menyembunyikan informasi keuangan agar kondisi perusahaan terlihat lebih baik di mata investor maupun publik. Jika dianalisis secara mendalam, pelanggaran etika dalam kasus tersebut biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama yang dapat diidentifikasi adalah faktor internal individu, seperti rendahnya integritas moral, tekanan untuk mencapai target kinerja, serta motivasi pribadi untuk memperoleh keuntungan finansial atau mempertahankan posisi dalam organisasi. Individu yang memiliki kesadaran etis yang rendah cenderung lebih mudah terlibat dalam praktik manipulasi data demi mencapai tujuan tertentu.

Selain faktor individu, faktor internal organisasi juga sering berperan dalam terjadinya pelanggaran etika. Dalam banyak kasus manipulasi laporan keuangan, budaya organisasi yang terlalu menekankan pencapaian keuntungan jangka pendek dapat menciptakan tekanan bagi para manajer dan karyawan untuk menunjukkan kinerja yang tinggi, bahkan jika hal tersebut harus dicapai melalui cara-cara yang tidak etis. Kelemahan sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, serta tidak adanya mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) juga dapat memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Dalam kondisi seperti ini, pelanggaran etika tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tertentu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem organisasi dalam membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas.

Contoh kasus lain dapat ditemukan dalam pelanggaran etika di sektor pelayanan publik, seperti praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Dalam kasus semacam ini, faktor eksternal seperti kondisi politik dan sistem hukum sering kali memiliki pengaruh yang signifikan. Apabila sistem pengawasan dalam pemerintahan lemah dan penegakan hukum tidak berjalan secara efektif, maka peluang untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin besar. Selain itu, budaya sosial yang permisif terhadap praktik suap atau gratifikasi juga dapat memperkuat kecenderungan terjadinya pelanggaran etika dalam lingkungan birokrasi.

Contoh lain yang sering muncul dalam dunia bisnis modern adalah pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi, seperti penyalahgunaan data pribadi pelanggan atau pelanggaran hak cipta digital. Dalam kasus ini, faktor teknologi menjadi salah satu penyebab utama yang memungkinkan terjadinya pelanggaran etika. Perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses terhadap berbagai informasi, tetapi sekaligus juga membuka peluang bagi individu atau organisasi untuk memanfaatkan data secara tidak bertanggung jawab. Apabila perusahaan tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data dan keamanan informasi, maka risiko terjadinya pelanggaran etika akan semakin meningkat.

Melalui analisis berbagai studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika dalam dunia bisnis dan profesi umumnya terjadi akibat interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup karakter individu, budaya organisasi, serta sistem pengawasan dalam perusahaan atau institusi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pendekatan studi kasus membantu menunjukkan bahwa perilaku tidak etis sering kali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling memengaruhi, bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan moral individu.

Oleh karena itu, pembelajaran melalui studi kasus memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan etika profesi. Dengan

menganalisis kasus-kasus nyata, mahasiswa maupun praktisi dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi masalah etika serta menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini juga membantu memperkuat kesadaran bahwa penerapan etika dalam dunia kerja tidak hanya memerlukan aturan formal, tetapi juga komitmen moral dari setiap individu serta dukungan dari sistem organisasi dan lingkungan sosial yang lebih luas.



**ETIKA  
PROFESI  
PARIWISATA**

# **PENDEKATAN ANALISIS TERHADAP KASUS-KASUS PELANGGARAN ETIKA**

## **BAB VI**

### **A. KERANGKA ANALISIS**

#### **1. Dilema moral**

Setelah tahap pengumpulan data dan fakta dilakukan secara sistematis, langkah berikutnya dalam kerangka analisis kasus pelanggaran etika adalah mengidentifikasi dilema moral yang muncul dalam kasus tersebut. Identifikasi dilema moral merupakan tahap yang sangat penting karena pada tahap inilah analis berusaha memahami inti persoalan etika yang terjadi. Dalam banyak kasus pelanggaran etika, masalah yang muncul tidak selalu sederhana atau jelas antara benar dan salah. Sebaliknya, sering kali individu atau organisasi dihadapkan pada situasi yang melibatkan konflik antara dua atau lebih nilai moral yang sama-sama penting. Situasi semacam ini dikenal sebagai dilema moral.

Dilema moral dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seseorang harus memilih di antara dua alternatif tindakan yang keduanya memiliki konsekuensi moral yang signifikan. Dalam kondisi tersebut, setiap pilihan yang diambil biasanya mengandung konsekuensi yang dapat merugikan pihak tertentu atau melanggar nilai moral tertentu. Oleh karena itu, individu yang menghadapi dilema moral sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan yang paling tepat karena tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas dari masalah etika. Dalam konteks dunia bisnis dan profesi, dilema moral dapat muncul ketika seseorang harus

memilih antara kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat, antara loyalitas terhadap atasan dan kejujuran profesional, atau antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial.<sup>96</sup>

Dalam proses identifikasi dilema moral, analis perlu terlebih dahulu memahami nilai-nilai moral yang terlibat dalam situasi tersebut. Nilai-nilai ini dapat mencakup prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Ketika dua atau lebih nilai tersebut saling bertentangan, maka individu atau organisasi yang terlibat dalam kasus tersebut harus menentukan nilai mana yang harus diprioritaskan. Misalnya, dalam kasus seorang karyawan yang mengetahui adanya manipulasi laporan keuangan dalam perusahaannya, ia mungkin menghadapi dilema antara menjaga loyalitas terhadap perusahaan atau mengungkapkan kebenaran demi kepentingan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa dilema moral tidak selalu berkaitan dengan pilihan antara tindakan baik dan tindakan buruk, tetapi sering kali merupakan pilihan antara dua nilai yang sama-sama memiliki dasar moral yang kuat.

Selain memahami nilai-nilai yang terlibat, identifikasi dilema moral juga memerlukan analisis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam suatu kasus. Setiap keputusan yang diambil dalam situasi dilema moral biasanya akan berdampak pada berbagai pihak, seperti karyawan, manajemen perusahaan, konsumen, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi analis untuk mempertimbangkan bagaimana setiap pilihan tindakan akan memengaruhi kepentingan dan hak-hak dari masing-masing pihak tersebut. Dengan memahami berbagai perspektif yang terlibat, analis dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan etika yang sedang dihadapi.

Dalam praktiknya, dilema moral sering kali muncul karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam organisasi atau profesi. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang memiliki

---

96 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 149–151.

dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan sehingga dapat memengaruhi objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Misalnya, seorang pejabat publik yang memiliki hubungan pribadi dengan perusahaan tertentu mungkin menghadapi dilema ketika harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang lebih luas.



<https://expertindo-training.com/menghadapi-dilema-moral-dalam-memimpin/>

Selain itu, dilema moral juga dapat muncul akibat tekanan organisasi atau tekanan lingkungan kerja. Dalam beberapa kasus, individu mungkin mengetahui bahwa suatu tindakan yang diperintahkan oleh atasan atau organisasi bertentangan dengan prinsip etika, tetapi mereka merasa terpaksa melakukannya karena takut kehilangan pekerjaan atau menghadapi sanksi tertentu. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa dilema moral sering kali tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan moral pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan budaya organisasi yang ada.

Dengan demikian, identifikasi dilema moral merupakan langkah penting dalam proses analisis kasus pelanggaran etika. Melalui tahap ini, analis dapat memahami konflik nilai yang menjadi inti permasalahan serta mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat dan kepentingan yang dipertaruhkan. Pemahaman yang jelas mengenai dilema moral akan membantu dalam menentukan langkah-langkah analisis berikutnya, seperti mengevaluasi alternatif tindakan berdasarkan prinsip-prinsip etika serta menentukan keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.

Pada akhirnya, kemampuan untuk mengidentifikasi dilema moral merupakan keterampilan yang sangat penting bagi setiap individu yang terlibat dalam dunia bisnis dan profesi. Dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat lebih peka terhadap dimensi etika dalam berbagai situasi yang dihadapi serta mampu mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan praktis, tetapi juga nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan bersama dalam masyarakat.

## 2. Pelanggaran etika (termasuk landasan etikanya)

Setelah dilema moral dalam suatu kasus berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya dalam kerangka analisis pelanggaran etika adalah mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika yang terjadi serta landasan etika yang dilanggar. Tahap ini bertujuan untuk menentukan secara lebih jelas apakah tindakan yang dilakukan oleh individu atau



<https://grc-indonesia.com/akibat-buruk-korupsi-dan-suap-menyuap/>

organisasi benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam profesi, organisasi, maupun masyarakat secara umum. Dengan kata lain, tahap ini merupakan proses untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika berdasarkan standar moral dan norma profesional yang telah disepakati.

Pelanggaran etika dapat dipahami sebagai tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma sosial, atau kode etik profesi yang seharusnya menjadi pedoman perilaku individu maupun organisasi. Dalam dunia bisnis dan profesi, pelanggaran etika dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penipuan (fraud), manipulasi data, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak konsumen, hingga praktik korupsi. Setiap bentuk pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan

publik terhadap profesi atau institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu, identifikasi yang tepat terhadap jenis pelanggaran etika sangat penting agar analisis yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang akurat mengenai permasalahan yang terjadi.<sup>97</sup>

Dalam proses identifikasi pelanggaran etika, analisis perlu memperhatikan standar atau landasan etika yang menjadi acuan dalam menilai suatu tindakan. Landasan etika ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti prinsip moral universal, teori etika, kode etik profesi, maupun peraturan organisasi. Misalnya, dalam teori etika deontologi, suatu tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, seperti kejujuran dan keadilan. Jika seseorang dengan sengaja memalsukan laporan keuangan perusahaan, maka tindakan tersebut jelas melanggar prinsip kejujuran yang menjadi salah satu landasan penting dalam etika bisnis dan profesi. Sementara itu, dalam perspektif utilitarianisme, suatu tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan banyak orang. Jika suatu tindakan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis karena tidak memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bersama.

Selain teori etika, kode etik profesi juga menjadi landasan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran etika. Setiap profesi biasanya memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya. Kode etik ini mencerminkan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya, dalam profesi akuntansi terdapat kewajiban untuk menjaga integritas, objektivitas, serta transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila seorang akuntan dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian perusahaan, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum,

---

97 Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases* (Boston: Pearson Education, 2012), 112–114.

tetapi juga melanggar kode etik profesi yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab profesional.

Identifikasi pelanggaran etika juga memerlukan analisis terhadap dampak tindakan tersebut terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam banyak kasus, pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada individu atau organisasi tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat luas. Misalnya, manipulasi laporan keuangan perusahaan publik dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor dan merusak stabilitas pasar keuangan. Demikian pula, pelanggaran etika dalam sektor pelayanan publik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, analisis pelanggaran etika perlu mempertimbangkan tidak hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga konsekuensi yang ditimbulkan bagi berbagai pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam beberapa kasus pelanggaran etika, tindakan yang dilakukan mungkin tidak secara langsung melanggar hukum, tetapi tetap bertentangan dengan prinsip moral atau nilai-nilai etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam profesi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa etika memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum. Hukum menetapkan batas minimum perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, sedangkan etika sering kali menuntut standar perilaku yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam menganalisis kasus pelanggaran etika, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga nilai-nilai moral yang menjadi dasar dari praktik profesional yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, identifikasi pelanggaran etika beserta landasan etikanya merupakan tahap penting dalam kerangka analisis kasus pelanggaran etika. Melalui proses ini, analis dapat menentukan secara jelas tindakan apa yang melanggar prinsip etika serta norma moral yang menjadi dasar penilaian tersebut. Pemahaman yang tepat mengenai pelanggaran etika akan menjadi landasan bagi langkah-langkah analisis berikutnya, seperti mengevaluasi alternatif solusi dan menentukan tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan bertanggung jawab.

### 3. Identifikasi kontributor / akar sebab pelanggaran etika (internal & eksternal)

Setelah tahap pengumpulan data dan fakta serta identifikasi dilema moral dan bentuk pelanggaran etika dilakukan, langkah berikutnya dalam kerangka analisis kasus pelanggaran etika adalah mengidentifikasi faktor-faktor kontributor atau akar penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Tahap ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengapa pelanggaran etika dapat terjadi dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku individu maupun organisasi sehingga tindakan yang tidak etis tersebut muncul. Dengan mengetahui akar penyebabnya, organisasi maupun masyarakat dapat merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya pelanggaran etika serupa di masa depan.

Dalam banyak kasus, pelanggaran etika tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal biasanya berasal dari dalam diri individu atau dari dalam organisasi tempat individu tersebut bekerja. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan yang lebih luas, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, serta sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu faktor internal yang sering menjadi penyebab utama pelanggaran etika adalah karakter dan integritas individu. Individu yang memiliki integritas moral yang rendah cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak etis, terutama ketika terdapat peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kurangnya kesadaran moral, lemahnya pengendalian diri, serta orientasi yang terlalu kuat pada keuntungan pribadi dapat mendorong seseorang untuk mengabaikan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks dunia profesional, hal ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk pelanggaran, seperti manipulasi laporan, penyalahgunaan jabatan, atau pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan pihak lain.

Selain faktor individu, faktor internal organisasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya pelanggaran etika. Budaya organisasi yang tidak sehat, misalnya budaya yang hanya menekankan pencapaian target tanpa memperhatikan cara mencapainya, dapat menciptakan tekanan bagi karyawan untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak etis. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal juga dapat membuka peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan tanpa takut terdeteksi. Ketika organisasi tidak memiliki sistem transparansi, mekanisme pelaporan pelanggaran, atau sanksi yang tegas terhadap perilaku tidak etis, maka risiko terjadinya pelanggaran etika akan semakin besar.

Di samping faktor internal, pelanggaran etika juga sering dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan bisnis dan sosial. Salah satu contoh faktor eksternal adalah kondisi ekonomi yang penuh persaingan. Persaingan bisnis yang sangat ketat dapat mendorong perusahaan atau individu untuk mencari cara-cara yang tidak etis demi mempertahankan posisi mereka di pasar. Misalnya, perusahaan mungkin tergoda untuk menurunkan standar kualitas produk, memanipulasi informasi dalam iklan, atau melakukan praktik bisnis yang tidak adil terhadap pesaingnya.

Faktor eksternal lain yang juga berpengaruh adalah kondisi politik dan sistem hukum dalam suatu negara. Apabila sistem hukum tidak ditegakkan secara konsisten atau terdapat praktik korupsi dalam birokrasi pemerintahan, maka individu maupun organisasi mungkin merasa bahwa pelanggaran etika dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius. Kondisi seperti ini dapat menciptakan lingkungan yang permisif terhadap berbagai bentuk penyimpangan, seperti suap, kolusi, maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga dapat berperan dalam membentuk perilaku etis atau tidak etis dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya tertentu dapat memengaruhi cara individu memandang praktik-praktik tertentu, seperti pemberian hadiah, hubungan personal dalam bisnis, atau bentuk-bentuk lain dari interaksi sosial

yang mungkin dianggap sebagai konflik kepentingan dalam perspektif etika profesional. Dalam konteks globalisasi, perbedaan nilai budaya ini sering kali menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan sistem nilai yang berbeda.

Dengan demikian, identifikasi kontributor atau akar sebab pelanggaran etika merupakan langkah penting dalam proses analisis etika karena membantu mengungkap faktor-faktor mendasar yang memicu terjadinya penyimpangan. Analisis ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa pelanggaran etika tidak selalu semata-mata disebabkan oleh kesalahan individu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi organisasi maupun lingkungan sosial yang lebih luas.

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab tersebut, organisasi dapat merancang strategi pencegahan yang lebih efektif, seperti memperkuat sistem pengawasan internal, membangun budaya organisasi yang berintegritas, serta meningkatkan kesadaran etika di antara para anggotanya. Dengan demikian, analisis akar penyebab tidak hanya membantu menjelaskan mengapa pelanggaran etika terjadi, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis dan profesional yang lebih etis dan bertanggung jawab.

#### 4. Pengambilan kesimpulan/keputusan/ rekomendasi solusi

Tahap terakhir dalam kerangka analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran etika adalah pengambilan kesimpulan, keputusan, serta perumusan rekomendasi solusi. Tahap ini merupakan bagian yang sangat penting karena seluruh proses analisis yang telah dilakukan sebelumnya—mulai dari pengumpulan data dan fakta, identifikasi dilema moral, identifikasi pelanggaran etika, hingga analisis faktor penyebab—pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan etika secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki landasan

moral yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pengambilan kesimpulan dalam analisis etika dilakukan dengan merangkum seluruh temuan yang diperoleh dari proses analisis sebelumnya. Pada tahap ini, analisis perlu menilai secara objektif fakta-fakta yang telah dikumpulkan serta mempertimbangkan berbagai aspek etika yang terlibat dalam kasus tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan harus mampu menjelaskan secara jelas apakah tindakan yang terjadi merupakan pelanggaran etika, siapa saja pihak yang terlibat, serta nilai-nilai moral apa saja yang dilanggar. Selain itu, kesimpulan juga harus mencerminkan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks situasi yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut.



<https://wolipop.detik.com/parenting/d-1499106/6-etika-berjabat-tangan-secara-profesional>

Setelah kesimpulan diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan keputusan etis yang paling tepat dalam menghadapi kasus tersebut. Keputusan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang relevan, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak-hak pihak lain. Dalam beberapa kasus, keputusan etis dapat berupa tindakan korektif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, misalnya dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk individu, organisasi, maupun masyarakat yang lebih luas.

Dalam proses pengambilan keputusan etis, analisis juga perlu mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Setiap alternatif solusi harus dievaluasi berdasarkan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya serta kesesuaiannya

dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya solusi yang paling praktis, tetapi juga yang paling adil dan bertanggung jawab secara moral. Dalam konteks dunia bisnis dan profesi, keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap kode etik profesi serta peraturan organisasi yang berlaku.

Selain pengambilan keputusan, tahap ini juga mencakup perumusan rekomendasi solusi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika serupa di masa depan. Rekomendasi ini biasanya mencakup berbagai langkah strategis, seperti memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan etika kepada anggota organisasi. Dengan adanya rekomendasi tersebut, organisasi dapat memperbaiki kelemahan sistem yang sebelumnya memungkinkan terjadinya pelanggaran etika.

Dalam banyak kasus, pelanggaran etika tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu tertentu, tetapi juga dengan kegagalan sistem organisasi dalam membangun budaya etika yang kuat. Oleh karena itu, rekomendasi solusi juga perlu mencakup upaya untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, tanggung jawab, serta profesionalisme. Budaya organisasi yang etis dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam setiap aktivitas profesional yang mereka lakukan.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dikomunikasikan secara jelas kepada pihak-pihak yang terkait. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi atau institusi yang bersangkutan. Dalam konteks dunia bisnis, reputasi perusahaan sering kali sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan tersebut menangani kasus pelanggaran etika yang terjadi di dalam organisasinya.

Dengan demikian, tahap pengambilan kesimpulan, keputusan, dan rekomendasi solusi merupakan bagian akhir yang sangat penting dalam kerangka analisis kasus pelanggaran etika. Melalui tahap ini, hasil analisis tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan etika yang terjadi, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bertanggung jawab. Keputusan yang diambil berdasarkan analisis etika yang matang diharapkan dapat membantu menciptakan praktik bisnis dan profesional yang lebih adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

## **B. PENERAPAN KERANGKA ANALISIS DALAM STUDI KASUS**

Penerapan kerangka analisis dalam studi kasus merupakan tahap penting dalam pembelajaran etika profesi karena memungkinkan teori dan konsep etika yang telah dipelajari sebelumnya diterapkan secara langsung pada situasi nyata. Dalam konteks ini, kerangka analisis berfungsi sebagai alat sistematis untuk memahami, menilai, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran etika yang terjadi dalam dunia bisnis dan profesi. Dengan menggunakan pendekatan analitis yang terstruktur, seseorang dapat menilai suatu kasus secara objektif dan menghasilkan keputusan yang tidak hanya rasional tetapi juga memiliki dasar moral yang kuat.

Penerapan kerangka analisis biasanya dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami kasus secara menyeluruh. Dalam tahap ini, semua informasi yang relevan mengenai kasus harus dikumpulkan secara sistematis. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta kejadian, latar belakang peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta konteks organisasi atau lingkungan tempat peristiwa tersebut terjadi. Proses pengumpulan data ini sangat penting karena analisis etika yang baik harus didasarkan pada fakta yang akurat dan bukan pada asumsi atau opini yang tidak didukung oleh bukti. Dengan memahami fakta-fakta yang ada secara komprehensif, analisis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang sedang dihadapi.

Setelah fakta-fakta terkumpul, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dilema moral yang muncul dalam kasus tersebut. Dilema moral terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua atau lebih pilihan tindakan yang masing-masing memiliki konsekuensi moral tertentu. Dalam dunia bisnis dan profesi, dilema moral sering kali muncul karena adanya konflik antara kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, serta kepentingan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, seorang manajer mungkin menghadapi dilema antara menjaga loyalitas terhadap perusahaan atau melaporkan praktik yang tidak etis yang terjadi di dalam organisasi. Identifikasi dilema moral ini penting karena membantu menentukan nilai-nilai etika apa saja yang sedang dipertaruhkan dalam kasus tersebut.

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika yang terjadi. Dalam tahap ini, analisis perlu menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu melanggar prinsip-prinsip etika atau kode etik profesi yang berlaku. Penilaian ini dapat dilakukan dengan membandingkan tindakan yang terjadi dengan standar etika yang telah ditetapkan oleh organisasi, profesi, maupun norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Jika ditemukan adanya pelanggaran etika, maka perlu dijelaskan secara jelas prinsip etika apa yang dilanggar, misalnya prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, atau penghormatan terhadap hak-hak pihak lain.

Selanjutnya, kerangka analisis juga mengharuskan adanya identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran etika. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan organisasi dan masyarakat. Faktor internal misalnya meliputi karakter individu, motivasi pribadi, atau tekanan untuk mencapai target tertentu. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa budaya organisasi yang tidak sehat, sistem pengawasan yang lemah, persaingan bisnis yang tidak sehat, maupun tekanan dari lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor penyebab tersebut, analisis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan yang terjadi.

Tahap terakhir dalam penerapan kerangka analisis adalah merumuskan kesimpulan serta memberikan rekomendasi solusi terhadap kasus yang dianalisis. Kesimpulan harus didasarkan pada seluruh proses analisis yang telah dilakukan sebelumnya dan harus mampu menjelaskan secara jelas bagaimana kasus tersebut seharusnya dinilai dari sudut pandang etika. Selain itu, rekomendasi solusi juga perlu dirumuskan sebagai langkah untuk memperbaiki situasi yang terjadi serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan. Rekomendasi tersebut dapat berupa tindakan korektif terhadap pihak yang melanggar, perbaikan sistem pengawasan dalam organisasi, maupun peningkatan pendidikan dan pelatihan etika bagi para profesional.

Dalam praktiknya, penerapan kerangka analisis dalam studi kasus tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan etika yang sedang dihadapi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang penting bagi individu maupun organisasi. Melalui analisis kasus, seseorang dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip etika diterapkan dalam situasi nyata yang sering kali kompleks dan penuh dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Selain itu, studi kasus juga dapat membantu meningkatkan kesadaran etika serta kemampuan pengambilan keputusan moral dalam lingkungan profesional.

Dengan demikian, penerapan kerangka analisis dalam studi kasus merupakan metode yang efektif untuk mengintegrasikan teori etika dengan praktik profesional. Pendekatan ini memungkinkan individu maupun organisasi untuk menilai suatu permasalahan secara kritis, memahami konsekuensi moral dari berbagai pilihan tindakan, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab profesional.

# Daftar Pustaka

- Bertens, K. 2011. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Beauchamp, Tom L., dan James F. Childress. 2013. *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press.
- Crane, Andrew, dan Dirk Matten. 2016. *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Ferrell, O.C., John Fraedrich, dan Linda Ferrell. 2019. *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases*. Boston: Cengage Learning.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 1997. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pitana, I Gede, dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- UNWTO (World Tourism Organization). 2001. *Global Code of Ethics for Tourism*. Madrid: World Tourism Organization.
- Velasquez, Manuel G. 2012. *Business Ethics: Concepts and Cases*. Boston: Pearson Education.
- Wheelen, Thomas L., dan J. David Hunger. 2012. *Strategic Management and Business Policy*. New Jersey: Pearson.



**B**uku ajar Etika Profesi Pariwisata ini membahas secara komprehensif konsep dasar etika sebagai landasan moral dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi, sosial, maupun profesional. Dimulai dari pengertian etika, moral, serta perbedaannya dengan etiket, hukum, dan agama, buku ini mengajak pembaca memahami bahwa etika tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga refleksi kritis terhadap nilai-nilai baik dan buruk dalam kehidupan. Pembahasan etika umum dan etika khusus memberikan dasar teoritis sekaligus praktis bagi pembaca dalam memahami bagaimana prinsip moral diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan karakter individu dan hubungan sosial yang harmonis.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan penerapan etika dalam berbagai bidang profesi, khususnya dalam dunia pariwisata, serta profesi lain seperti bisnis, medis, dan hukum. Penekanan diberikan pada pentingnya integritas, tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan terhadap sesama, budaya, dan lingkungan dalam praktik profesional. Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini menjadi panduan penting bagi mahasiswa dan praktisi pariwisata untuk membangun sikap profesional yang bermoral, beretika, dan berorientasi pada keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat.



Jl. Merpati, Karangmojo  
Wedomartani, Sleman, DIY.



ISBN: Proses Pengajuan